

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
Jalan Sukapura VI Bojongkoneng Singaparna Telepon (0265) 330163
fax (02650) 330163 email : disperta@tasikmlayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 telah dapat kami susun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk merencanakan pembangunan pertanian, pangan dan perikanan selama lima tahun secara bertahap.

Harapan kami dengan Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman, referensi, acuan dan arah kegiatan pembangunan pertanian bagi seluruh komponen yang merupakan pelaku pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya.

Kami sadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan kedepan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



NURAEDIDIN, S.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650504 198403 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau Lembaga pemerintah non

kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar kebutuhan organisasi untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang sehingga ada pengakuan (*recognized*) dan respon dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

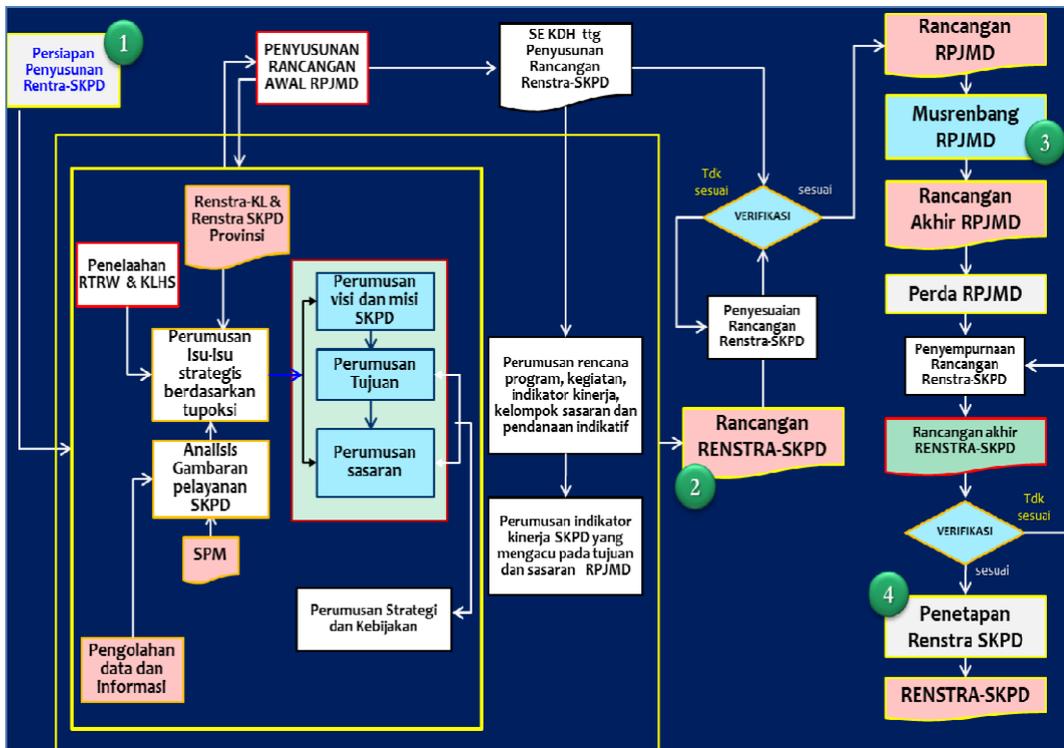
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah) disusun dengan tahapan :

- a) persiapan penyusunan;
- b) penyusunan rancangan awal;
- c) penyusunan rancangan
- d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e) perumusan rancangan akhir; dan
- f) penetapan.

Setelah itu, pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu dikendalikan dan dievaluasi agar sesuai dengan standar penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku pimpinan perangkat daerah, yang mana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya.

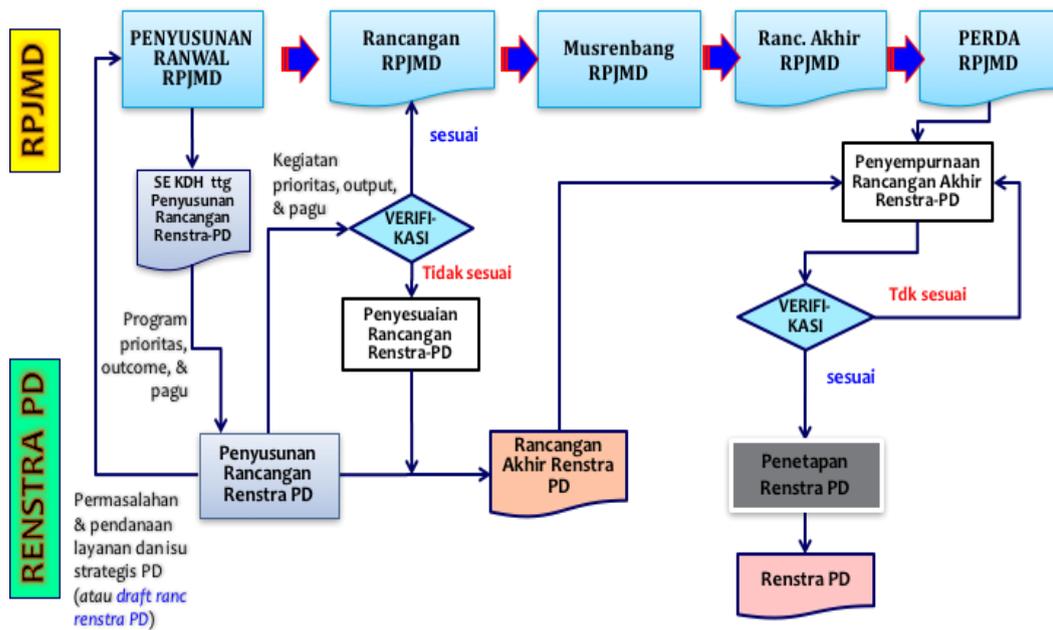
Adapun Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan sebagai berikut :



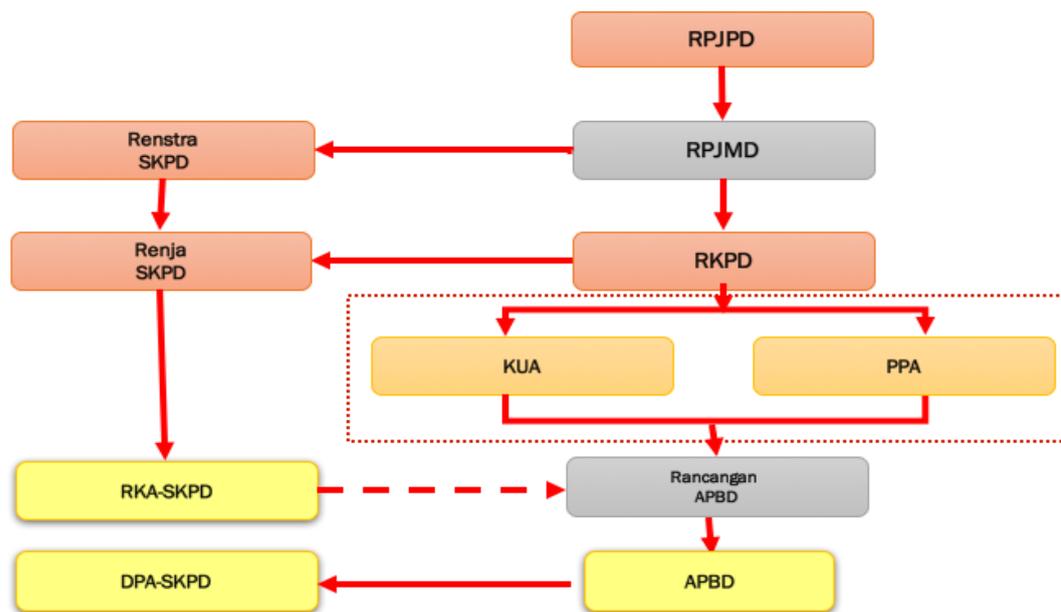
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah kemudian dijabarkan menjadi Program Tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan Pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian Dokumen Perencanaan Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta perkiraan maju yang disusun pada rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.

Rumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen yang utuh dari unsur pimpinan dan staf melalui proses komunikasi yang baik antara *top-down* dan *bottom-up approach*. Untuk mewujudkan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan diperlukan sinergitas dan keterpaduan antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik di daerah maupun nasional.

Rencana strategis menjadi sarana operasional Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal instansi terutama dalam masalah dinamika manajemen dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan peran dan

kontribusi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Praktek manajemen yang baik selalu memasukkan pertimbangan perencanaan sumber daya dan anggaran dalam perencanaan strategis. Renstra menggariskan arah perkembangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, sedangkan anggaran merupakan salah satu sumber daya untuk melaksanakannya. Sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang strategis seringkali tidak responsif terhadap berbagai kondisi dan perubahan dimasa mendatang. Perencanaan Strategis diperlukan untuk memandu proses anggaran dan Kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum untuk melaksanakan penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

- tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
 22. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 910/103/Bapp tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan pada bidang urusan pertanian, urusan ketahanan pangan serta bidang urusan perikanan dan kelautan Kabupaten Tasikmalaya.

Program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh *stakeholder* secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Bupati Tasikmalaya ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, beserta program prioritas dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Capaian Kinerja masa Renstra periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian terkait Perangkat Daerah Propinsi terkait serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah .

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Tugas Pokok: **“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang tanaman pangan, bidang kebun dan horti, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.”**

Dengan menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil, perbibitan dan produksi peternakan serta penyuluhan dan sarana prasarana pertanian serta bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Penyelenggaraan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan mutu, peredaran dan
- e. pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. Penyelenggaraan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- g. Penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- h. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;

- i. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan
- j. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pangan dan perikanan;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan dan perikanan;
- m. Penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, pangan dan perikanan;
- n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- o. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. Pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- q. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- r. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis.

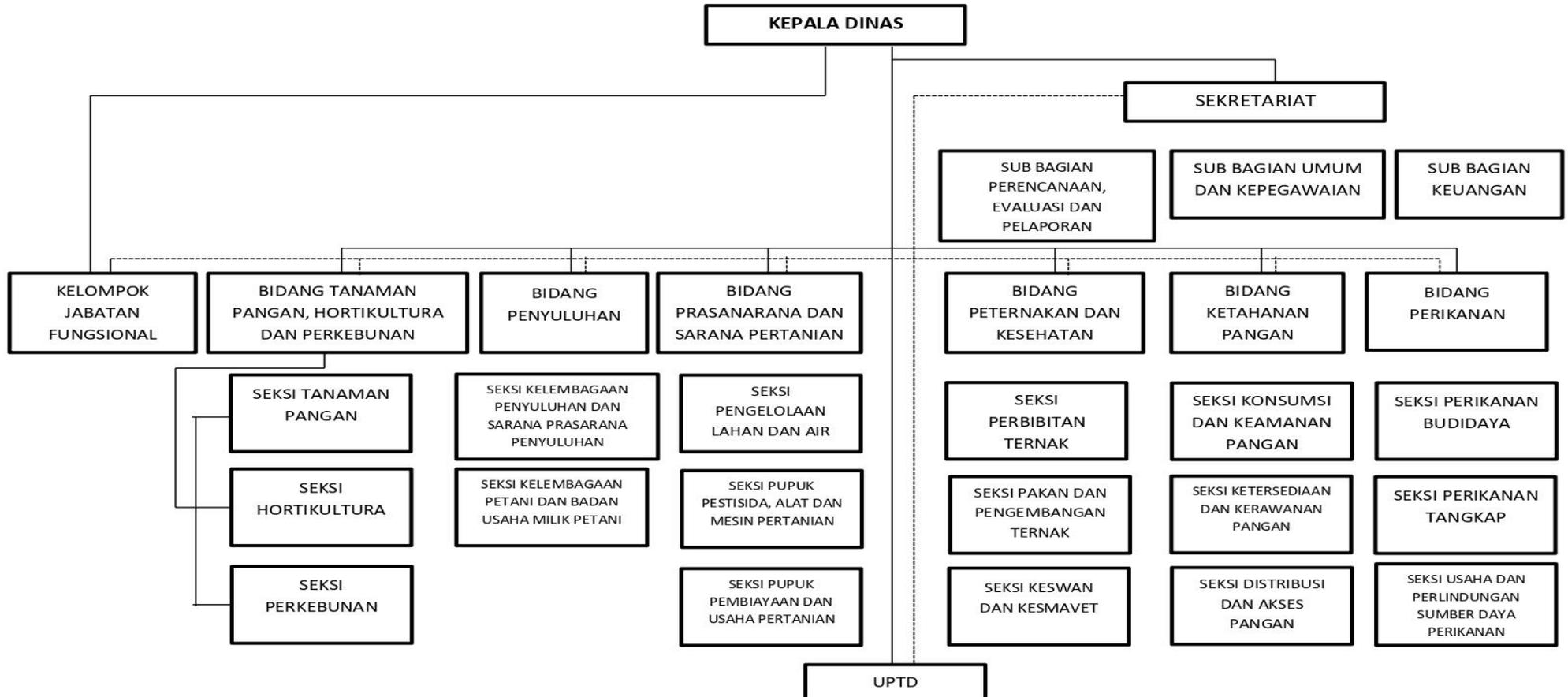
Susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura; dan
 3. Seksi Perkebunan.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan;

2. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
1. Seksi Perbibitan Ternak
 2. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri atas:
1. Seksi Pengelolaan Lahan Dan Air;
 2. Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian;
- g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Akses Pangan; Dan
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TASIKMALAYA



Rincian tugas pokok seluruh unsur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan tugas Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan perikanan serta pembinaan unit pelaksana teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
3. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha perikanan;
4. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
5. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepala dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- c. Menyelenggarakan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- g. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan/ikan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
- i. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- k. Menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan perikanan;
- l. Menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- m. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan

- pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - p. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
 - q. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - r. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
 - s. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah; dan
 - t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang tanaman pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meliputi produksi padi palawija, perkebunan dan hortikultura.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberiäri bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, koordinasi penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- i. i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi tanaman pangan;
- b. Seksi hortikultura; dan

- c. Seksi perkebunan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan meliputi perbibitan dan produksi peternakan, pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi produksi perbibitan peternakan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengembangan peternakan;
- d. Pembinaan usaha sektor peternakan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- d. Menyelenggarakan pengendalian dan penyediaan bibit ternak, pakan ternak dan benih atau bibit hijauan pakan ternak;
- e. Menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

- f. Menyelenggarakan proses pemberian izin atau rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil;
- h. Menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- i. Menyelenggarakan pengawasan obat hewan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- k. Menyelenggarakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- l. Menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi perizinan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Seksi perbibitan dan produksi peternakan;
- 2) Seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- 3) Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

5. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunany pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan meliputi aspek kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian mempunyai fungsi :

- 1. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis penyuluhan;

2. Penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan meliputi kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani; dan
3. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Penyuluhan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penyuluhan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang penyuluhan;
- d. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi bidang penyuluhan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan di bidang penyuluhan;
- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri;
- i. Menyelenggarakan integrasi, sinkronisasi lintas sektor optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- j. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah dalam aspek penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;

- l. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia penyuluh;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang penyuluhan, terdiri atas:

- a) Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan
- b) Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Petani.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Penyelenggaraan kebijakan teknis potensi dan pengelolaan dan irigasi pertanian;
- d. Penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- e. Penyelenggaraan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan usaha pertanian; dan
- f. Penyelenggaraan pemberian fasilitasi investasi pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air serta alat mesin pertanian;
- c. Menyelenggarakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Menyelenggarakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan dan usaha pertanian;
- f. Menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- b) Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- c) Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian

7. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ketahanan pangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan pendampingan di bidang ketahanan pangan; dan
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang ketahanan pangan;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang ketahanan pangan; dan
- g. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang ketahanan pangan, meliputi:

- a. Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Seksi distribusi dan akses pangan; dan
- c. Seksi konsumsi dan keamanan pangan.

8. Bidang Perikanan

Bidang perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas, bidang perikanan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama di bidang perikanan; dan
- d. Penyelenggaraan pembinaan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perikanan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perikanan;
- b. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- d. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan budidaya meliputi sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan tangkap meliputi sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;

- j. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- k. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang perikanan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perikanan terdiri atas:

- a. Seksi perikanan budidaya;
- b. Seksi perikanan tangkap; dan
- c. Seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kekuatan Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai definitif ada 253 orang, meliputi 105 pegawai struktural dan 148 tenaga fungsional. Jumlah pegawai selengkapnya berdasarkan eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	130	
	Ruang Kepala	1	
	Ruang Rapat Pimpinan	1	
	Aula	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Kasubag	3	
	Ruang Kepala Bidang	6	
	Ruang Kepala Seksi	18	
	Ruang Pelayanan (front office)	1	
	Ruang Pengolahan (back office)	0	
	Ruang Penerbitan	0	
	Ruang Arsip	1	
	Ruang Tunggu	1	
No.	Uraian	-	Ket
	Loket Pembayaran	-	
	Loket Informasi & Pengaduan	-	
	Ruang Rokok	1	
	Ruang Laktasi	-	
	Ruang Satpam	1	
	Ruang Serbaguna	-	
	Ruang Baca dan Bermain Anak	-	
	Musholla	1	
	Pantry	-	
	Kamar Mandi/WC	8	
2.	Kendaraan Roda 4	22	
3.	Kendaraan Roda 2	312	
4.	Komputer/PC	46	
5.	Laptop	24	
6.	Printer	32	
7.	Server	1	
8.	Telephone	1	
9.	Faximili	1	
10.	Infocus	5	
11.	Layar Infocus	2	
12.	Internet	6	
	Jaringan Speedy 100 Mbs	-	

13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	E-mail disperta@tasikmalayakab.go.id	1	
	Local Area Network Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIM Perizinan)	1	
14.	Tablet	-	
15.	Mesin Penghancur Kertas	12	
16.	Scanner	10	
17.	Digital Kamera	6	
18.	Televisi	-	
19.	USB Adapter	-	
20.	Handphone	-	
21.	Standing Bracket	-	
22.	CCTV	-	
23.	Pendingin Ruangan	20	
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	-	
25.	Kursi Tunggu Tamu	14	
26.	Kursi Sofa	14	
No.	Uraian	-	Ket
27.	Meja Kerja	88	
28.	Meja Pelayanan	2	
29.	Kursi Kerja	67	
30.	Lemari Kayu	16	
31.	Lemari Besi	34	
32.	Rak Arsip	7	
33.	Brankas	1	
34.	Perosotan Anak	-	
35.	Kursi Sofa Baca	-	
36.	Rak Buku Minimalis	-	
37.	Meja Popok Laktasi	-	
38.	Lemari Es Laktasi	-	

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	47
		Golongan III	151
		Golongan IV	55
2.	Pendidikan	SD	-
		SMP	-
		SMA	89
		D1	2
		D3	14
		D4	36
		S1	69
		S2	43
		S3	-
3.	Eselon	II	1
		III	7
		IV	45

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	Jumlah Total Personal (org)	Jumlah Personil (org) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Pangkat		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Golongan		Jumlah Pejabat	
		3	4	5	6	7	8	Struktural	Fungsional (org)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	253	SD	-	Juru Muda	-	1/a	-	Struktural 47	Penyuluh 126
		SLTP	-	Juru Muda Tk.I	-	1/b	-	Pelaksana 58	Medik veteriner 4
		SLTA	89	Juru	-	1/c	-		Pengawas Mutu Pakan 8
		D.I	2	Juru Tk.I	-	1/d	-		Pengawas Bibit Ternak 6

		D.III	14	Pengatur Muda	13	II/ a	13		Paramedik Veteriner 4
		D.IV	36	Pengatur Muda Tk.I	5	II/ b	5		
		S.1	69	Pengatur	22	II/c	22		
		S.2	43	Pengatur Tk.I	7	II/ d	7		
		S.3	-	Penata Muda	50	III/ a	50		
				Penata Muda Tk.I	27	III/ b	27		
				Penata	31	III/ c	31		
				Penata Tk.I	43	III/ d	43		
				Pembina	19	IV/ a	19		
				Pembina Tk.I	29	IV/ b	29		
				Pembina Utama Muda	7	IV/ c	7		

No	JABATAN	JUMLAH	KETERANGA N
1	Pejabat Struktural	47	
2	Pejabat Fungsional		
	a. Fungsional Penyuluh	126	
	b. Medik Veteriner	4	
	c. Pengawas Mutu Pakan	8	
	d. Pengawas Bibit Ternak	6	
	e. Paramedik Veteriner	4	
3	Pelaksana	58	
	Jumlah	253	

2.3. Sumber Daya Unit Operasional Teknis

Dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah dilengkapi dengan 11 (Sebelas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut :

Tabel 2.4.
UPTD Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	UPT	Keterangan
1	Balai Benih Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	UPT penyedia benih unggul padi palawija (Mangunreja)
		UPT penyedia benih hortikultura dan perkebunan (Cimintar Cipatujah)
2	Perbibitan Ternak	UPT Sapi Potong Tawang dan UPT Kambing PE Malaganti (Penyediaan Bibit Sapi Potong dan Kambing Perah; Kemitraan Usaha Sapi Potong dan Kambing Perah
3	Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Manonjaya, RPH Singaparna dan RPH Ciawi (Pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak besar (sapi dan kerbau)
4	Puskesmas	Wilayah I,II,III
5	Laboratorium Veteriner	Kabupaten
6	Pasar Hewan	Pasar Hewan Manonjaya, Pasar Hewan Padakembang, Pasar Hewan Ciawi, Pasar Hewan Pancatengah (Pelayanan fasilitas perdagangan hewan ternak besar dan kecil (Sapi, Kerbau, Kambing dan domba)
7	Wilayah Pertanian	Taraju, Singaparna, Ciawi, Cikatomas, Manonjaya, Sukaraja, Karangnunggal
8	Balai Benih Ikan	BBI Rancapaku, BBI Padakembang
9	Pasar Ikan	Pasar Ikan Jatihurip, Pasar Ikan Singaparna, dan Pasar Ikan Padakembang
10	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cipatujah

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun-					Realisasi Capaian Tahun-					Rasio (%) Capaian pada Tahun-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan jumlah produksi hasil olahan komoditas pertanian	%	2,01	1,70	2,00	2,05	0,52	2,01	2,05	2,13	2,06	0,48	100,00	120,59	106,49	100,49	92,31
2	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,00	0,80	0,90	1,00	0,27	1,30	1,18	1,00	0,83	0,81	130,00	147,50	111,17	83,00	300,00
3	Persentase peningkatan produksi hortikultura	%	1,00	0,80	0,90	1,00	0,27	(2,39)	(2,78)	1,03	0,96	0,73	-239,00	-347,50	114,52	96,00	270,37
4	Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	1,50	1,30	1,40	1,50	0,40	0,01	(0,01)	1,52	1,49	0,6	0,67	-0,77	108,75	99,33	150,00
5	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	%	2,00	1,70	2,00	2,05	0,50	0,36	(17,66)	2,11	1,98	0,33	18,00	-1038,82	105,43	96,59	66,00
6	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	%	65,40	67,40	79,15	80,75	80,00	65,99	68,09	79,94	82,50	81,5	100,90	101,02	101,00	102,17	394,86

7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	7,81	7,81	9,77	7,99	2,95	5,30	7,45	5,57	7,75	2,90	67,86	95,39	56,96	97,00	98,31
---	--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa terdapat 3 indikator yang tidak tercapai, yaitu

- Persentase Produksi Hortikultura Tahun 2016 dan 2017;
- Persentase Produksi Perkebunan Tahun 2016 dan 2017
- Persentase Produksi Peternakan Tahun 2016 dan 2017

Faktor pendukung pencapaian kinerja:

1. Dispersikan terus berusaha mengoptimalkan produksi semua urusan (pertanian, pangan dan perikanan);
2. Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan
3. Upaya untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) yang berbasis sumber pangan lokal agar terus dilakukan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Dampak Perubahan Iklim (DPI)
2. Penyediaan Bibit Unggul
3. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Prasarana
4. Refocusing dan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Uraian Program	Anggaran pada Tahun-					Realisasi Anggaran pada Tahun-					Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	980.813.630	0	574.367.750	920.482.515	1.770.115.600	893.511.604	0	520.449.935	812.077.340	513.712.578	91,10	0,00	90,61	88,22	29,02	9,77	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207.140.000	0	330.260.000	560.991.750	435.504.600	170.405.227	0	314.381.245	457.250.815	170.675.060	82,27	0,00	95,19	81,51	39,19	21,56	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	0	0	0	44.500.000	60.000.000	0	0	0	44.500.000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	13.300.000	20.000.000	0	0	0	13.165.000	7.820.000	0,00	0,00	0,00	98,98	39,10	0,00	0,00
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	155.000.000	0	125.000.000	12.990.000	38.750.000	70.499.000	0	111.479.000	12.724.250	36.825.000	45,48	0,00	89,18	97,95	95,03	119,86	0,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	0	0	0	7.388.594.840	3.221.165.000	0	0	0	7.114.184.910	549.915.000	0,00	0,00	0,00	96,29	17,07	0,00	0,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkeb	30.441.178.500	75.278.163.200	86.016.942.000	65.763.611.144	18.392.654.400	29.464.488.400	74.244.182.395	84.318.971.310	63.859.763.640	101.434.000	96,79	98,63	98,03	97,11	0,55	3,31	1,39

unan																	
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	0	0	0	0	3.500.000.000	0	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Budi Daya Perikanan	0	0	0	2.238.308.410	2.038.077.500	0	0	0	2.051.378.216	86.929.500	0,00	0,00	0,00	91,65	4,27	0,00	0,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	0	11.500.000.000	14.575.000.000	19.962.924.500	11.337.165.000	0	11.094.584.390	14.171.627.550	19.201.629.887	51.165.000	0,00	96,47	97,23	96,19	0,45	0,00	3,65
Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	0	0	0	521.935.500	741.212.500	0	0	0	434.915.928	334.710.000	0,00	0,00	0,00	83,33	45,16	0,00	0,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian	638.000.000	930.000.000	700.000.000	1.035.668.250	0	638.000.000	859.076.560	694.100.000	949.178.310	0	100,00	92,37	99,16	91,65	0,00	0,00	8,26
Program Peningkatan Usaha Perikanan	0	0	0	254.937.800	34.285.000	0	0	0	250.309.460	28.950.000	0,00	0,00	0,00	98,18	84,44	0,00	0,00
Program Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan	28.159.374.760	34.296.912.400	18.120.000.000	30.175.716.400	2.878.505.000	27.726.286.620	33.773.570.650	16.261.510.750	29.595.621.630	28.505.000	98,46	98,47	89,74	98,08	0,99	1,56	1,55
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	44.411.301.959	5.533.799.000	6.884.670.000	8.830.074.000	3.467.486.500	39.789.271.611	5.467.910.450	6.869.907.100	8.751.834.200	966.308.500	89,59	98,81	99,79	99,11	27,87	11,62	1,21

Program Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Ternak	0	455.000.000	850.000.000	622.469.020	277.299.000	0	451.981.500	835.220.939	598.734.923	107.299.000	0,00	99,34	98,26	96,19	38,69	0,00	0,67
Program Peningkatan Usaha Peternakan	0	95.000.000	1.300.000.000	54.665.000	12.700.000	0	94.859.000	1.279.716.000	54.665.000	12.700.000	0,00	99,85	98,44	100,00	100,00	0,00	0,15
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan	0	0	0	233.085.000	424.560.000	0	0	0	227.286.000	201.860.000	0,00	0,00	0,00	97,51	47,55	0,00	0,00
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau	0	1.205.231.000	600.000.000	474.106.750	0	0	1.133.948.600	585.004.250	423.163.600	0	0,00	94,09	97,50	89,25	0,00	0,00	6,29
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	390.079.050	0	0	0	0	388.714.050	0	0	0	0	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
Jumlah	105.052.808.849	129.294.105.600	130.076.239.750	139.063.860.879	48.633.980.100	98.812.462.462	127.120.113.545	125.962.368.079	134.807.883.109	3.243.308.638	94,06	98,32	96,84	96,94	6,67	6,32	1,71

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap segala kendala dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan	Menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan.	Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan.
2	Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian	Keterbatasan akses Petani Terhadap Lembaga Permodalan dan Pasar	Masih Rendahnya Daya Saing Kompetitif dan Komparatif
3	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian	Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian yang diakibatkan lulusan pertanian yang berlatar belakang agronomi, hama penyakit dan teknologi pertanian masih kurang disamping jumlah pegawai yang terus berkurang sehingga luas wilayah kabupaten tidak seimbang dengan keberadaan jumlah pegawai yang ada.	Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.
4	Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian	Belum adanya konsep wawasan pertanian terpadu (<i>integrated farming system</i>) dalam membangun pertanian.	Secara kelembagaan, kelompok tani masih lemah, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.
5	Dampak Perubahan Iklim (DPI)	<i>Permasalahan ekologi/lingkungan</i>	Perubahan iklim pada zaman sekarang merupakan menjadi

			kendala yang serius karena iklim.
6	<i>Fluktuasi Harga Pangan</i>	Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan.	Harga jual yang sangat fluktuatif sangat mempengaruhi inflasi.
7	<i>Ketersediaan Pangan Kurang Memadai</i>	Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (1,39%/tahun) mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat.	Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat.
8	<i>Penurunan kualitas perairan</i>	Permasalahan ekologi lingkungan yang terjadi adalah tekanan terhadap Sumberdaya ikan terutama di daerah pesisir dan perairan umum daratan (Sungai, waduk, embung, danau dll). Tekanan ini menyebabkan stok ikan yang menurun.	Penurunan kualitas air dapat menyebabkan masa pemeliharaan ikan semakin lama, ikan lebih mudah terkena penyakit, konversi pakan makin tinggi (boros pakan), produktivitas budidaya perikanan akan menurun, sehingga biaya produksi akan meningkat.
9	<i>Rendahnya Tingkat Kemandirian Pangan</i>	Di desa dengan kategori miskin masih banyak penduduk rawan pangan.	Masih terdapat 31 desa rawan pangan di Kabupaten Tasikmalaya.
10	<i>Besarnya porsi biaya dan tingginya harga sarana produksi pakan</i>	Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, sehingga ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, dan usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan.	Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari Negara lain (impor), sedangkan pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik.
11	<i>Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Belum Optimal</i>	Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya khususnya pada proses pendederan/pembenihan di sentra-sentra pembenihan ikan air tawar	<i>Sarana Prasarana Pembenihan belum memadai.</i>

	(Sukaratu, Padakembang dan Singaparna) masih terkendala oleh penurunan debit dan kualitas air akibat aktivitas kegiatan tertentu di luar perikanan.	
--	---	--

3.1.1 Permasalahan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan

Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan; banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan dan menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan.

2. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Prasarana

Ketersediaan infrastruktur (prasarana dan sarana pertanian) belum memadai yang diakibatkan oleh faktor-faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur dan sarana prasarana.

3. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian

Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian yang diakibatkan lulusan pertanian yang berlatar belakang agronomi, hama penyakit dan teknologi pertanian masih kurang disamping jumlah pegawai yang terus berkurang sehingga luas wilayah kabupaten tidak seimbang dengan keberadaan jumlah pegawai yang ada. Secara kelembagaan, kelompok tani masih lemah, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.

4. Keterbatasan akses Petani Terhadap Lembaga Permodalan dan Pasar

Masalah kekurangan modal yang dihadapi petani menjadi isu klasik karena memang sifat usaha bidang pertanian belum mendapat dukungan yang penuh dari pihak perbankan.

5. Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian

Belum adanya konsep wawasan pertanian terpadu (*integrated farming system*) dalam membangun pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan) serta dukungan dari perindustrian guna mencapai sistem agribisnis.

6. Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Perubahan iklim pada zaman sekarang merupakan menjadi kendala yang serius karena iklim

7. Masih Rendahnya Daya Saing Kompetitif dan Komparatif

Pada dasarnya kepada tersedianya pasar dan informasi harga, kondisi yang selalu fluktuatif yang bergantung pada tengkulak dan pedagang yang sering merugikan petani.

8. Masih Tingginya Penggunaan Pupuk dan Pestisida an Organik

Masih lemahnya penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang ditandai antara lain dengan penggunaan pupuk dan bahan kimia anorganik yang berlebihan serta perkembangan teknologi seringkali menyebabkan tergerusnya kearifan lokal dan potensi sumberdaya lokal.

9. Mentalitas

Sempitnya kerangka berfikir petani terhadap usaha bidang pertanian itu sendiri, yaitu di satu sisi petani menggantungkan hidupnya pada usaha tani tetapi disatu sisi sebagian besar petani tidak bersungguh-sungguh dalam usaha taninya karena hanya dianggap sebagai tradisi saja (subsisten).

3.1.2 Permasalahan Utama Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan)

1. Ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan peternakan yang terintegrasi belum memadai

Ketika suatu sistem peternakan dikelola, maka daya dukung lahan sebagai pemasok hijauan harus dipikirkan. Sebaiknya suatu peternakan harus memiliki lahan hijauan tersendiri agar daya dukung lahan dapat dikelola dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan hijauan ternak. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan daya dukung lahan terhadap ketersediaan hijauan untuk produktivitas ternak. Faktor-faktor tersebut adalah 1) Kesuburan lahan; 2) Kondisi dan jenis tanaman yang tersedia; 3) Jenis dan Kondisi ternak; 4) Kondisi iklim.

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain. Sehubungan hal di atas dan menjamin kebutuhan pangan nasional asal ternak, maka usaha peternakan harus maju dan berkembang. Salah satu syaratnya adalah peternakan harus diberi lahan dengan cara memberi kepastian dalam RTRW untuk ruang peternakan.

Ketersediaan lahan inilah yang menjadi penghambat dalam pengembangan peternakan yang terintegrasi. Adanya tanah/lahan pangangan yang difungsikan di luar keperluan peternakan menyebabkan semakin sempitnya ruang bagi perluasan areal peternakan. Sehingga perlu didorong untuk mengembangkan kawasan peternakan rakyat yang terintegrasi melalui optimalisasi fungsi lahan pangangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pengembangan kawasan ini perlu juga diimplementasikan adanya integrasi peternakan dengan tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan. Adanya integrasi tersebut akan memberikan manfaat saling menguntungkan berupa

penyediaan pupuk kandang bagi tanaman serta limbah pertanian sebagai sumber pakan bagi ternak.

2. Penyediaan Bibit Unggul

Produktivitas ternak masyarakat khususnya ternak lokal (terutama sapi potong) belum optimal sehingga masih diperlukan upaya fasilitasi dalam pengembangan perbibitan secara terstruktur dan terarah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala tersebut adalah masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak betina, masih adanya pemotongan betina produktif dan keterbatasan SDM (Medis Veteriner/Dokter Hewan dan Paramedis Veteriner) serta Sarana Prasarana UPT Perbibitan Ternak Daerah.

Guna mendorong peningkatan penyediaan bibit unggul di daerah, perlu dilakukan beberapa upaya diantaranya Optimalisasi IB (Gertak Berahi IB), Pengawasan Peredaran Bibit dan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit.

Berkenaan dengan pengembangan sumberdaya genetik lokal, juga perlu didorong untuk melakukan pemurnian terhadap jenis ternak tersebut. Sumber daya genetic local yang ada di Kabupaten Tasikmalaya adalah ternak itik ras Cihateup yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu jenis ternak asli local asal Kabupaten Tasikmalaya.

3. Kelembagaan Kelompok Tani

Secara kelembagaan, kelompok tani ternak yang ada masih lemah. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani ternak.

4. Sarana Prasarana Pendukung Peternakan

Ketersediaan sarana prasarana pendukung usaha peternakan baik di sub sistem hulu maupun hilir seperti unit perbibitan, kebun HMT, Sumber Air, Jalan Produksi, Puskesmas, Pos IB, Fasilitas Pengolahan Limbah, Padang Penggembalaan, pasar ternak, rumah potong hewan belum memadai.

5. Permodalan petani

Lemahnya permodalan petani ternak, diakibatkan oleh faktor keterbatasan akses terhadap sumber permodalan selain dari pemerintah.

6. Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustri

Dengan produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya efisiensi produksi sehingga menyebabkan nilai tambah kurang memadai, sehingga sulit bersaing untuk meningkatkan kualitas produk.

7. Pengembangan Kawasan Peternakan Rakyat yang belum Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Pengelolaan ternak dan kesehatan ternak secara berkelanjutan menjadi pembicaraan yang mengemuka terkait adanya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pemanasan global. Pola peternakan saat ini seharusnya didorong untuk berubah yaitu dari sistem pengelolaan peternakan konvensional yang berorientasi produktivitas saja, menuju sistem pengelolaan peternakan berwawasan lingkungan.

8. Belum Optimalnya Penanganan Kesehatan Hewan dan Rehabilitasi Reproduksi

Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan populasi ternak adalah mengetahui status reproduksi ternak, dalam hal ini fertilitas dan pemeriksaan kebuntingan. Pemeriksaan infertilitas yang tidak tepat akan berimplikasi pada kegagalan treatment infertilitas yang diberikan. Demikian pula, pemeriksaan kebuntingan yang tidak akurat menyebabkan *days open* yang lebar. Lebih lanjut berakibat pada rendahnya angka kebuntingan.

9. Belum optimalnya Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Ternak dan hasil ternak.

Peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk pengolahan hasil ternak masih belum optimal, demikian pula upaya pemasarannya masih belum memadai.

10 Belum optimalnya pengawasan terhadap produk pangan asal hewan

3.1.3 Permasalahan Utama Bidang Perkebunan

1. Terjadinya penurunan daya dukung lahan sebagai akibat dari kurangnya diperhatikannya pengelolaan sumberdaya lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi, sehingga muncul lahan-lahan potensial kritis dan kurang produktif;
2. Kelembagaan petani perkebunan belum tertata dan terbina secara baik, sehingga fungsi kelembagaan belum dapat berjalan dengan baik;
3. Populasi tanaman perkebunan rakyat, belum memenuhi standar baku budidaya tanaman;
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi pestisida nabati dan agensi hayati dalam pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan;
5. Rendahnya luasan kepemilikan lahan petani perkebunan yang diperkirakan rata-rata 0,20 Ha;
6. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan;
7. Masih kurangnya infrastruktur perkebunan;
8. Penanganan kegiatan panen dan pasca panen produksi hasil perkebunan masih belum memenuhi standar baku hasil;
9. Masih rendahnya pendapatan petani perkebunan;
10. Terjadinya penurunan produksi dan produktivitas tanaman sebagai akibat tanaman tua/rusak (TT/TR).

3.1.4 Permasalahan Utama Bidang Ketahanan Pangan

2.3 Ketersediaan dan Distribusi Pangan

2.3.1.1 Ketersediaan Pangan Kurang Memadai

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (1,39%/tahun) mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga

membutuhkan ruang dan energi yang lebih besar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan terhadap daya dukung dan daya tampung yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, perluasan industri, perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat.

2.3.1.2 Fluktuasi Harga Pangan

Fluktuasi harga pangan perlu diantisipasi karena harga jual yang sangat fluktuatif sangat mempengaruhi inflasi. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan dunia, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu.

2.3.1.3 Terbatasnya fasilitas dan aktivitas lumbung pangan pedesaan

Dalam perkembangan kehidupan sosial di pedesaan saat ini lumbung – lumbung desa / lumbung pangan pribadi para petani sudah tidak terlihat lagi, sudah banyak yang dibongkar beralih fungsi karena kebutuhan. Karena tuntutan kebutuhan para petani kita juga banyak yang menjual padinya di sawah pada saat panen walaupun masih banyak juga yang membawa hasil panen padinya kerumah.

2.3.1.4 Rendahnya Tingkat Kemandirian Pangan

Di desa dengan kategori miskin masih banyak penduduk rawang pangan, menurut BKPD Provinsi Jawa Barat, masih terdapat 31 desa rawan pangan di Kabupaten Tasikmalaya.

2.3.1.5 Distribusi pangan kurang memadai

Kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di perdesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan nasional. Pengembangan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menggerakkan proses produksi dan distribusi/pemasaran komoditas pangan. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan, dapat mengakibatkan terganggunya transportasi dan distribusi bahan pangan dan akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Selain itu juga mempertinggi proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan.

2.4 Konsumsi dan Keamanan Pangan

2.4.1.1 Kurangnya Kesadaran Konsumsi Pangan

Selain laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, faktor kebiasaan penduduk yang hanya mengonsumsi jenis pangan tertentu, misalnya beras, akan memberikan tekanan yang berat terhadap penyediaan pangan tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) yang berbasis sumber pangan lokal agar terus dilakukan.

2.4.1.2 Kurangnya Keragaman Pangan

Kurangnya keragaman pangan dapat dilihat dari Skor pola pangan harapan konsumsi yang baru mencapai 67,10% dari angka ideal 100%.

2.4.1.3 Kurangnya Kesadaran Keamanan Pangan

Di berbagai daerah telah terjadi beberapa kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya. Hal ini antara lain dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran para pengusaha waralaba (ritel) untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu, belum efektifnya

penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas, standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri, belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar serta koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

1. Permasalahan Utama Bidang Perikanan

a. Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan (Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar serta Nelayan) masih rendah

Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan (Pembudidaya, pengolah/pemasar dan nelayan) masih rendah disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1) Kepemilikan lahan masih rendah;

Lahan merupakan syarat utama dalam usaha budidaya perikanan. Karena usahanya merupakan sampingan dan skala kecil, maka kepemilikan lahan masih rendah.

2) Kondisi SDM masyarakat nelayan yang mayoritas masih kurang memadai.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan formal yang sebagian besar disebabkan oleh sulitnya sekolah atau akses di daerah pesisir. Kurangnya pendidikan ini berdampak sulitnya masyarakat nelayan untuk menerima transfer ilmu maupun transfer teknologi, sehingga sering terjadi pelanggaran.

3) Inefisiensi Usaha

Permasalahan yang terjadi adalah usaha perikanan yang belum efisien maupun kontinuitas produksi yang tidak stabil. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya sarana prasarana maupun pengetahuan untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah pada produk perikanan. Dampak dari rendahnya daya saing produk perikanan tangkap adalah berkurangnya

lapangan pekerjaan, yang diiringi menurunnya pendapatan masyarakat. Secara global maka negara juga akan mengalami kerugian akibat menurunnya devisa

4) *Akses permodalan usaha perikanan masih terbatas*

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi masyarakat nelayan yang sebagian besar merupakan nelayan skala kecil. Selain itu suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan nelayan di Indonesia. Dampak dari terbatasnya akses permodalan usaha bagi nelayan adalah sulitnya perkembangan usaha perikanan tangkap atau cenderung stagnan. Di sisi lain terbatasnya akses permodalan bagi nelayan juga menyebabkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak berimbang terutama di daerah pesisir.

5) *Besarnya porsi biaya dan tingginya harga sarana produksi pakan*

Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari Negara lain (impor), sedangkan pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik, sehingga kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, sehingga ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, dan usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan.

b. *Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Belum Optimal*

Pencapaian produksi ikan konsumsi dan benih belum optimal sebagai akibat beberapa hal sebagai berikut :

1) *Sarana Prasarana Pembenihan*

Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya khususnya pada proses pendederan/pembenihan di sentra-sentra pembenihan ikan air tawar (Sukaratu, Padakembang dan Singaparna) masih terkendala oleh penurunan debit dan kualitas air akibat aktivitas kegiatan tertentu di luar perikanan.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah menyebabkan berkurangnya sumber daya ikan.

2) *Penurunan kualitas perairan*

Penurunan kualitas air dapat menyebabkan masa pemeliharaan ikan semakin lama, ikan lebih mudah terkena penyakit, konversi pakan makin tinggi (boros pakan), produktivitas budidaya perikanan akan menurun, sehingga biaya produksi akan meningkat dan dalam jangka panjang kegiatan usaha perikanan budidaya menjadi tidak menarik lagi.

3) *Kepastian tata ruang usaha budidaya perikanan*

Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain serta tidak ada kepastian hukum dalam arti fisik dan fungsional bagi para investor perikanan budidaya sehingga *sustainability* usaha perikanan budidaya tidak bisa dijamin. Juga tidak ada jaminan bahwa perairan yang ada tidak akan tercemari baik oleh limbah industri, pertanian ataupun rumah tangga yang berada dibagian hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) yang mengalir di kawasan tersebut.

4) *Permasalahan ekologi/lingkungan*

Permasalahan ekologi lingkungan yang terjadi adalah tekanan terhadap Sumberdaya ikan terutama di daerah pesisir dan perairan umum daratan (Sungai, waduk, embung, danau dll). Tekanan ini menyebabkan stok ikan yang menurun. Akar penyebab dari menurunnya sumberdaya ikan adalah penyalahgunaan alat tangkap seperti ukuran mata jaring yang terlalu kecil sehingga menyebabkan banyak tertangkapnya ikan berukuran kecil yang belum matang. Hal ini diperparah oleh aktivitas usaha pertambangan pasir besi di sebagian besar pantai Kabupaten Tasikmalaya.

5) *Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) belum memadai;*

Kondisi PPI tersebut menyebabkan penggunaan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, yaitu

perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal ikan berukuran 0,5 sampai 3 *gross tonnage* (GT), sehingga produksi perikanan tangkap saat ini hanya mampu mencapai 13% dari potensi yang ada.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu: **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

a. Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa gotong yang berarti "mengangkat" dan royong yang berarti "bersama". Bersama dengan musyawarah, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, serta kekeluargaan, gotong royong menjadi dasar filsafat Indonesia.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan untuk mencapai tujuan bersama.

b. Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السلام)

yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang.

Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

c. Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

d. Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam table berikut ini.

Tabel 3.2
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
-------------	-------------------------	-------------------

<p>DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA</p>	<p>Gotong Royong</p>	<p>Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.</p>
	<p>Religius/Islami</p>	<p>Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran</p>

		dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Berdaya Saing	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.</p>
	Sejahtera	<p>Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk</p>

		ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang- orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat
		dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 3.3
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/ Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahl q mulia, sehat cerdas, berbuda ilmu Pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam Melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme
			aparatur,efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

2.	Berdaya Saing dan Kesejahteraan	<p>Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata</p> <p>Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global</p>	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
----	---------------------------------	---	--

“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan kewenangan dinas yaitu terdapat pada Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan

pariwisata”. Dinas juga diharapkan dapat merespon dan menjawab tantangan dalam isu strategis peningkatan produksi di bidang pertanian serta usaha agribisnis.

Terkait dengan pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan dalam menjawab tantangan dalam misi dan isu strategis pemerintah daerah tersebut, maka akan cukup sentral perannya karena ketahanan pangan dan perikanan rakyat bersama dengan usaha pertanian lainnya merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagian besar perikanan rakyat masih merupakan usaha subsisten (sampingan) dan belum secara sepenuhnya menerapkan system agribisnis, namun dengan dorongan dan fasilitasi pemerintah usaha perikanan rakyat dapat diarahkan untuk menerapkan system agribisnis yang merupakan satu kesatuan usaha yang terintegrasi dengan dukungan berbagai sektor.

Dalam hal-hal tertentu, agribisnis dapat terintegrasi dengan pariwisata dalam suatu kawasan menjadi suatu kawasan agrowisata.

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

No.	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai	a. Pengembangan Kawasan Teritegrasi belum memadai b. Sarana Prasarana Pendukung Peternakan	a. Keterbatasan SDM aparatur b. Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan	a. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU Peternakan dan Kesehatan

Visi : **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

No.	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	c. Permodalan Petani Ternak d. Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustry b. Ketersediaan pangan kurang memadai; c. Fluktuasi harga pangan; d. Lemahnya distribusi pangan e. Produksi Perikanan Belum Optimal a. Daya Saing Lemah	Petani c. Kondisi geografis d. Ketersediaan Ruang dan Lahan Untuk Budidaya e. Pertumbuhan produksi pangan dan penduduk tidak seimbang; f. Tinggi permintaan pangan; g. Fasilitas lumbung dan lembaga distribusi pangan tidak berjalan optimal h. Penurunan kualitas	Hewan serta propinsi melalui Perda Tata Ruang dan Zonasi; b. Adanya potensi alam yang cukup mendukung c. Tersedianya teknologi

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Provinsi Terkait

1. Renstra Kementerian Pertanian

a. Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian

Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas

pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan

- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
- b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
- c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
- d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
- e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
- f. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
- g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
- h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas;

Tabel. 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Bidang Pangan berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”			
No	Misi	Permasalahan	Faktor

			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan ketahanan pangan	Sistem pertanian berkelanjutan belum berjalan dengan baik	Pemahaman sistem pertanian berkelanjutan yang dipadukan dengan sistem agribisnis belum direalisasikan secara real	Memiliki wilayah yang masih luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
		Alih fungsi lahan pertanian	Alih fungsi lahan pertanian	
2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Belum go Agroindustri	Pola pikir petani yang belum berorientasi pada usaha tani	Memiliki komoditas yang dapat diunggulkan
3	Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana petani	Sarana prasarana belum memadai	Pola pikir petani yang belum berorientasi pada usaha tani	
		Sistem pertanian yang dilaksanakan secara integral belum dilaksanakan dengan baik	Masih adanya ego bidang	basis pertanian sebagian besar berada di perdesaan
		Penguasaan IPTEK yang masih kurang	Pola pikir petani yang belum berorientasi pada usaha tani	a. Jumlah kelompok tani yang terus meningkat b. memiliki komoditas unggulan
		Sistem kemitraan belum berjalan dengan baik	Pola pikir petani yang belum berorientasi pada usaha tani	Memiliki komoditas yang dapat diunggulkan
			Tata niaga pertanian belum berjalan dengan baik	Potensi pasar pertanian masih
		Masih banyak SDM yang belum	SDM yang expert/	Ketersediaan SDM

		profesional	ahli/spesifikasi masih kurang	
--	--	-------------	----------------------------------	--

Implementasi program dan kegiatan, maka program yang terkait erat serta menjadi program prioritas nasional di bidang pertanian adalah :

(1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
2. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi.
3. Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

(2) Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura ;

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
2. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
3. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kondisi faktual faktor-faktor pendukung program prioritas Kementerian Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- (1) Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam, wilayah binaan yang terdiri dari 39 kecamatan dengan berbagai potensi unggulan komoditas, yaitu Tasikmalaya Utara dan Timur sebagai penghasil padi, Tasikmalaya Barat sebagai penghasil padi dan hortikultura dan Tasikmalaya Selatan sebagai penghasil palawija dan hortikultura sehingga menjadi suatu peluang yang baik;
- (2) Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin meningkat, dengan indikasi penerapan adopsi inovasi teknologi pertanian oleh para petani yang salah satunya Kabupaten Tasikmalaya sebagai penghasil dan sebagai

eksportir beras organik di Jawa Barat dan penghasil manggis terbesar di Jawa Barat merupakan suatu peluang untuk lebih dikenal ke khalayak luas;

- (3) Pangsa pasar selalu terbuka mengikuti *trend* dan kebutuhan maka ini menjadi suatu peluang yang bisa dimanfaatkan;
- (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang kawasan lahan pertanian berkelanjutan yang menjadi acuan penyusunan Perda tentang konversi lahan dan perlindungan lahan berkelanjutan.

2. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP

dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

- a. Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- c. Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat,

memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Dari uraian visi misi dan arah kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pembangunan perikanan dan kelautan adalah guna mewujudkan adanya kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dalam bidang perikanan dan kelautan di Indonesia. Ketiga tujuan tersebut merupakan pendekatan dalam upaya membangun masyarakat perikanan dan kelautan baik fisik maupun non fisik.

Untuk implementasi di daerah, pendekatan kedaulatan mencakup upaya-upaya dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan produksi perikanan, sedangkan pendekatan keberlanjutan mencakup upaya-upaya dalam melestarikan sumber daya perikanan serta mendorong peningkatan kemandirian, daya saing dan nilai tambah hasil perikanan. Sementara untuk kesejahteraan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM pelaku utama perikanan baik budidaya, tangkap maupun pengolahan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 3.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi : “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Dispersikan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung Perikanan dan Kelautan	Keterbatasan SDM aparatur	Tersedianya teknologi pendukung

2	mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Kepastian tata ruang usaha budidaya perikanan	Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Tersedianya potensi sumber daya perikanan dan kelautan
3	mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.	Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustri	Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Tersedianya teknologi pendukung

3. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi.

Sasaran : Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.

Strategi : Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan.

Kebijakan pembangunan pertanian di Jawa Barat diarahkan pada :

- 1) Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya.
- 2) Desentralisasi pelayanan kesehatan

- 3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
- 4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
- 5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
- 6) Infrastruktur konektivitas wilayah
- 7) Gerakan bangun desa (Gerbang desa)
- 8) Subsidi gratis golekmah
- 9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan DISPERPAKAN	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan	Sistem agribisnis belum berjalan dengan benar	Pemahaman sistem agribisnis dan agroindustri belum direalisasikan	Penumbuhan agroindustri
2	Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia pertanian		Masih banyak penempatan SDM yang tidak sesuai keahliannya	Ketersediaan SDM
3	Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sarana prasarana pertanian	Sistem agribisnis belum berjalan dengan benar Lahan pertanian yang harus dikonservasi atau dilestarikan belum <i>up to date</i>	Pemahaman sistem agribisnis dan agroindustri belum direalisasikan	Penumbuhan agroindustri
4	Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan	Inkonsistensi antara pembangunan dan dukungan anggaran	Saprodi belum memadai	Peningkatan infrastruktur pertanian

5	Meningkatkan akses pasar dan permodalan	Kemitraan belum terjalin dengan baik	Sarana pendukung pemasaran pertanian belum memadai	Perbaikan tata niaga pertanian
				Pembuatan kawasan pertanian berkelanjutan

Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya terfokus pada Pengembangan Agribisnis, dimana pelaku utama yang dikedepankan adalah petani yang sejahtera dengan segala aspek pendukungnya seperti sarana dan prasarana, kelembagaannya, sistem informasinya serta aspek penyuluhan bagi petani. Kebijakan tersebut memiliki faktor penghambat berupa SDM petani yang masih rendah, luas lahan yang semakin sempit, tataniaga yang belum baik, akses informasi petani masih terbatas, sedangkan faktor pendorongnya adalah ***bahwa Peningkatan Kemandirian Jawa Barat Dalam Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan.***

4. Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat adalah "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat".

Misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis;
- 2) Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; dan

- 3) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan.

Kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat diarahkan pada optimalisasi, potensi dasar daerah untuk :

- 1) Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya lokal,
- 2) Perluasan lapangan kerja berbasis agribisnis peternakan,
- 3) Meningkatkan produktivitas usaha,
- 4) Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal.

Kebijakan jangka menengah propinsi Jawa Barat di bidang peternakan pada prinsipnya terfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan produktivitas serta peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan tersebut berkaitan dengan permasalahan pelayanan SKPD DPPK terkait dengan masalah Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagaan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana. Faktor penghambatnya adalah berupa produktivitas ternak yang masih rendah, terbatasnya SDM petugas teknis, lemahnya SDM petani ternak, serta sulitnya meningkatkan nilai tambah produk akibat kurang efisiennya proses produksi. *Faktor pendorongnya adalah bahwa potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi.*

Tabel 3.8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pertanian, Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi : "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat"				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan DPPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1.	Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis	Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi sumber daya ternak dan lahan
2.	Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan	Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagaan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi sumber daya ternak dan lahan
3.	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan	Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi permintaan produk

Tabel.3.9 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Visi : DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata			
	Program : a. Peningkatan Kesejahteraan Petani.	Kesejahteraan Petani dan buruh tani belum meningkat	SDM Petani masih lemah/rendah Modal Usaha Tani terbatas	Potensi SDM Kelompok Tani Hutan/Kebun
	b. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan	Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan belum optimal	Sarana Produksi (Bibit, pupuk) yang berkualitas masih terbatas Pemeliharaan tanaman belum optimal Pendanaan terbatas	Potensi Komoditi Perkebunan cukup tersedia

5. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah "***Tercapainya Masyarakat Agribisnis Perkebunan Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera***". Sejalan dengan visi tersebut, maka *Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat* adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,
2. Meningkatkan Mutu hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha Perkebunan,
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan.

Beberapa program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang sangat erat hubungannya dengan program kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya khususnya Bidang Perkebunan, yang meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian;
2. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit *Tanaman, Ternak* dan Ikan;
4. Program Pemasaran & Pengolahan Hasil *Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan* dan Kehutanan.

6. Arah dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Secara sub sektoral, kebijakan pengembangan Ketahanan Pangan di Indonesia harus mengacu pada arah dan kebijakan yang digariskan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagai eselon I yang menangani bidang ketahanan pangan.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan

kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Sejalan dengan Undang-Undang Pangan tersebut, pemerintah baru dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menempatkan pangan sebagai salah satu agenda penting pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019 bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumberdaya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, serta 27 Peraturan/Surat Edaran Gubernur di 27 Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dapat segera terwujud manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu : “Terwujudnya **ketahanan pangan** melalui **penganekaragaman pangan** berbasis **sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan**”.

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*lead institution*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
- c. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- d. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- e. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) pemerintahan Joko Widodo dan Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan

untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2020-2024 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2020-2024 adalah: (1) Korporasi petani; (2) Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando; (3) Pertanian Keluarga (Family Farming) (4) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's).

a. Analisis dan Telaahan Terhadap Arah dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Arah dan kebijakan pangan nasional merujuk pada satu tujuan yaitu kedaulatan pangan. Prioritas utama pembangunan ketahanan pangan nasional adalah peningkatan ketersediaan pangan produksi local, distribusi dan aksesibilitas pangan untuk stabilitas harga mencegah spekulasi, peningkatan cadangan pangan pemerintah, serta perbaikan kualitas dan konsumsi gizi masyarakat.

Berdasarkan telaahan tersebut, kebijakan pangan daerah sudah seharusnya mendukung pencapaian tujuan kedaulatan pangan dimaksud. Pemerintah daerah harus memprioritaskan

pada ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

Tabel 3.10
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Visi : “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan Disperpakan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Ketersediaan pangan kurang memadai	Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding produksi pangan;	Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU pangan Adanya potensi alam yang cukup mendukung
2.	Memantapkan penanganan kerawanan pangan	Fluktuasi harga pangan	Fasilitas lumbung pangan yang tidak berjalan optimal	Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU pangan Adanya potensi alam yang cukup mendukung
3.	Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok	Lemahnya lembaga distribusi pangan masyarakat	Infrastruktur yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan	Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU pangan Adanya potensi alam yang cukup mendukung

Visi : “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”			
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan Disperpakan	Faktor

4.	Mewujudkan keamanan pangan segar	Kesadaran akan konsumsi dan keamanan pangan	Rendahnya keanekaragaman dan pengawasan keamanan pangan	Adanya dukungan dan komitmen pemerintah pusat melalui UU di bidang ketahanan pangan Adanya potensi alam yang cukup mendukung
----	----------------------------------	---	---	--

7. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat".

Misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis;
- 2) Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; dan
- 3) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan.

Dengan demikian kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat diarahkan pada optimalisasi, potensi dasar daerah untuk :

- 1) Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya lokal,
- 2) Perluasan lapangan kerja berbasis agribisnis peternakan,
- 3) Meningkatkan produktivitas usaha,
- 4) Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal.

Kebijakan jangka menengah propinsi Jawa Barat di bidang peternakan pada prinsipnya terfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan produktivitas serta peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan tersebut berkaitan dengan permasalahan pelayanan SKPD DPPK terkait dengan masalah Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana. Faktor penghambatnya adalah berupa produktivitas ternak yang masih rendah, terbatasnya SDM petugas teknis, lemahnya SDM petani ternak, serta sulitnya meningkatkan nilai tambah produk akibat kurang efisiennya proses produksi. Faktor pendorongnya adalah bahwa potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi.

Tabel 3.12

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat**

Visi : "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat"				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan DPPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis	Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi sumber daya ternak dan lahan

2.	Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan	Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagaan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi sumber daya ternak dan lahan
3.	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan	Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Terbatasnya SDM petugas Teknis	Potensi permintaan produk

8. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 *“Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Jawa Barat yang maju dan sejahtera “*

Pernyataan visi tersebut, memiliki beberapa kata kunci yang menjadi unsur pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta menjadi pengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembangunan perikanan dan kelautan.

MAJU berarti : *Sikap dan kondisi masyarakat perikanan dan kelautan yang produktif, berdaya saing, dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak, dan adaptif terhadap dinamika perubahan, namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.*

SEJAHTERA berarti : *Sikap dan kondisi masyarakat perikanan dan kelautan Jawa Barat yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupannya*

Misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumberdaya perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.
3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan.

Dari misi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk serta pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Tabel 3.13
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

Visi : 2020 “Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Jawa Barat yang maju dan sejahtera “				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan DPPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumberdaya perikanan dan kelautan	Kepastian tata ruang usaha budidaya perikanan	Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Tersedianya potensi sumber daya perikanan dan kelautan

2.	Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan	Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustri	Keterbatasan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan dan Wawasan Pembudidaya Ikan dan Nelayan	Tersedianya teknologi pendukung
3.	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan	Keterbatasan Sarana Prasarana Pendukung Perikanan dan Kelautan	Keterbatasan SDM aparatur	Tersedianya teknologi pendukung

3.4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

3.4.1 Kondisi Internal Dan Eksternal Pada Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya

a) ANALISIS INTERNAL (*STRENGTH AND WEAKNESESS* / KEKUATAN DAN KELEMAHAN)

FAKTOR STRENGTHS/KEKUATAN	FAKTOR WEAKNESESS/KELEMAHAN
a. Memiliki kewenangan dengan Perbup Nomor 67 tahun 2016	a. Motivasi kerja aparatur belum optimal
b. Keberadaan kelembagaan pertanian UPT/UPTD	b. Database yang masih kurang baik.
c. Tersedianya aparatur pertanian	c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia

Penjelasan Kekuatan

- (1) Peraturan merupakan dasar yang kuat dalam kewenangan penyelegaraan suatu instansi, maka dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 menjadi dasar yang kuat dan payung hukum dalam penyelenggaraan suatu instansi.

- (2) Keberadaan kelembagaan pertanian seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas seyogyanya menjadi kekuatan dalam membantu penyelenggaraan suatu instansi.
- (3) Tersedianya aparatur pertanian merupakan modal utama dalam pelaksanaan suatu penyelenggaraan instansi.

Penjelasan Kelemahan

- (1) Motivasi kerja yang belum optimal didasari pada penempatan aparatur yang kurang sesuai dengan pendidikannya dapat menjadi pemicu kurangnya optimalisasi kinerja aparatur.
- (2) Database yang masih kurang baik, karena belum optimalnya koordinasi antar sektor pertanian.
- (3) Sarana dan prasarana pada kenyataannya untuk dinas pertanian belum terealisasi secara nyata : kantor dinas terpisah jauh dengan kawasan perkantoran, UPT wilayah belum memiliki kantor, terbatasnya sarana mobilitas dan informasi sehingga menjadi kendala baik dalam koordinasi, kearsipan maupun aksesibilitas.

b) ANALISIS EKSTERNAL (*OPPORTUNITIES AND THREATS / PELUANG DAN ANCAMAN*)

FAKTOR <i>OPPORTUNITIES</i> / PELUANG	FAKTOR <i>THREATS</i> / ANCAMAN
a. Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.	a. Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/ hewan).
b. Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang.	b. Menurunnya minat masyarakat untuk usaha tani.
c. Terbukanya pangsa pasar untuk komoditas pertanian	c. Adanya globalisasi pasar bebas
d. Adanya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan.	d. Alih fungsi lahan pertanian tinggi

Penjelasan Peluang

- (1) Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam, wilayah binaan yang terdiri dari 39 kecamatan dengan berbagai potensi unggulan komoditas baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (2) Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin meningkat, dengan indikasi penerapan adopsi inovasi teknologi pertanian oleh para petani yang salah satunya Kabupaten Tasikmalaya sebagai penghasil dan sebagai eksportir beras organik di Jawa Barat dan penghasil manggis terbesar di Jawa Barat merupakan suatu peluang untuk lebih dikenal ke khalayak luas.
- (3) Pangsa pasar selalu terbuka mengikuti *trend* dan kebutuhan maka ini menjadi suatu peluang yang bisa dimanfaatkan.
- (4) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan yang menjadi acuan penyusunan Perda tentang konversi lahan dan perlindungan lahan berkelanjutan.

Penjelasan Ancaman

- (1) Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan), Tasikmalaya merupakan daerah yang rawan bencana khususnya gempa dan tanah longsor menjadi suatu ancaman bagi wilayah-wilayah binaan Dinas Pertanian disamping gangguan OPT.
- (2) Menurunnya minat masyarakat terhadap usahatani terutama generasi muda yang menganggap bahwa usaha pertanian kurang bergengsi selain itu petani di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah masyarakat tani subsisten.
- (3) Pasar bebas dan globalisasi menjadi suatu ancaman bagi masyarakat yang belum siap mengikuti arus globalisasi.

- (4) Alih fungsi lahan pertanian tinggi akan menyebabkan lahan-lahan pertanian yang potensial semakin berkurang.

Tabel 3.12 Penggambaran Matriks Analisis SWOT

INTERNAL	<u>Strenght</u>	<u>Weaknesses</u>
EKTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kewenangan dengan Perbup No.67 tahun 2016 b. Keberadaan kelembagaan pertanian UPTD c. Tersedianya aparatur pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Motivasi kerja aparatur belum optimal b. Database yang masih kurang baik. c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia
<u>Opportunities</u>	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. b. Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. c. Terbukanya pangsa pasar untuk komoditi pertanian d. Adanya UU No. 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan peraturan daerah No.67 tahun 2016 dalam penggunaan sarana prasarana untuk mendukung pembangunan pertanian b. Memanfaatkan keberadaan UPT untuk menginventarisir potensi wilayah yang belum tergal dengan baik. c. Mengoptimalkan keberadaan aparatur pertanian untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif di wilayah binaannya khususnya di pedesaan d. Penyusunan Perda tentang lahan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan konsep panduan mengenai kepemimpinan dan penciptaan tatanan kerja yang kondusif b. Membentuk struktur intern yang lebih solid serta penempatan aparatur yang profesional c. Memperbaiki dan melengkapi database supaya lebih <i>up to date</i> d. Menyelenggarakan diklat teknis substantif pertanian e. Pembinaan dan pembangunan kantor UPT wilayah f. Pemutakhiran data lahan pertanian yang potensial untuk dijadikan lahan berkelanjutan
<u>Threats</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan). b. Menurunnya minat masyarakat untuk usaha tani. c. Adanya globalisasi pasar bebas d. Alih fungsi lahan pertanian tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memasyarakatkan usahatani konservasi yang berwawasan lingkungan b. Mengoptimalkan keberadaan kelembagaan sesuai dengan payung hukum yang ada c. Memberdayakan keberadaan UPT untuk menginventarisir daerah-daerah yang berpotensi rawan bencana d. Mengoptimalkan keberadaan aparatur pertanian untuk 	

	<p>meningkatkan minat masyarakat melalui penyuluhan dan penerapan usahatani berwawasan agribisnis</p> <p>e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui pendekatan RTRW</p>	
--	---	--

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.17
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 7.400 (tujuh ribu	Pengembangan Budidaya Ternak Besar di Prioritaskan di wilayah Selatan, Budidaya Ternak Kecil di	a. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Adanya peruntukan yang jelas bagi pengembangan kawasan peternakan memberikan dampak	Pengembangan Budidaya Ternak Besar di Prioritaskan di wilayah Selatan, Budidaya Ternak Kecil di wilayah tengah, timur

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	empat ratus) hektar	wilayah tengah, timur dan barat serta budidaya ternak unggas di seluruh wilayah. Pengembangan Pengolahan hasil dan pascapanen diprioritaskan di pusat-pusat pertumbuhan perkotaan.	<p>Ternak</p> <p>c. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Peternakan</p> <p>d. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat</p> <p>e. Peningkatan Ketahanan Pangan</p>	yang signifikan terhadap peningkatan usaha ternak rakyat	dan barat serta budidaya ternak unggas di seluruh wilayah. Pengembangan Pengolahan hasil dan pascapanen diprioritaskan di pusat-pusat pertumbuhan perkotaan.
2	Kawasan peruntukan budidaya perikanan berupa budidaya perikanan air tawar kolam seluas kurang lebih 2.988 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar berada di seluruh kecamatan	Pengembangan budidaya ikan air tawar di hampir seluruh wilayah dengan kondisi air yang memadai. Pengembangan budidaya ikan laut di wilayah kecamatan pesisir.	<p>a. Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>b. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p>	Penyediaan ruang lahan kolam dengan kualitas air yang memadai akan dapat memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap usaha budidaya ikan masyarakat	Pengembangan budidaya ikan air tawar di hampir seluruh wilayah dengan kondisi air yang memadai. Pengembangan budidaya ikan laut di wilayah kecamatan pesisir.
3	jalur penangkapan I meliputi : 1) jalur penangk	Sesuai dengan rencana pola ruang	<p>a. Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>b. Optimalisasi</p>	Adanya pola ruang sesuai dengan jalur penangkapan memberikan	Sesuai dengan rencana pola ruang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>apan ikan I A berada pada perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah ; dan</p> <p>2) jalur penangkapan ikan I B berada pada perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.</p> <p>jalur penangkapan II berada pada perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan jalur penangkapan III meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan II.</p>		<p>si Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p>	<p>dampak yang signifikan terhadap usaha penangkapan ikan nelayan kecil</p>	

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	KSK Kawasan Pesisir meliputi : 1. Kecamatan Cipatujah; dan 2. Kecamatan Cikalong.	Sesuai dengan rencana pola ruang	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Adanya kepastian zonasi kawasan pesisir memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat pesisir	Sesuai dengan rencana pola ruang

Dalam pelaksanaan pelayanan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor-faktor penghambat dan pendorong berkaitan dengan Rencana Tata Ruang wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Telaahan RTRW Kabupaten Tasikmalaya

No.	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dispersikan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan Peruntukan kawasan pertanian/Kawasan Budidaya pertanian	Belum adanya kawasan peruntukan agroindustri Belum Tercapainya Indikator Renstra	Pengawasan dan pengendalian , Aktivitas yang merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi	Masih terbukanya ruang bagi kawasan budidaya, Adanya LP2B Komitmen pimpinan dengan kebijakan yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah

2.	Kawasan peruntukan peternakan, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kelautan (pesisir dan pulau-pulau kecil) baik budidaya (on-farm) maupun industri pengolahan hasil (off-farm)	Infrastruktur dan Sarana Prasarana, belum adanya industri peternakan	Pengawasan dan pengendalian, Aktivitas yang merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi	Masih terbukanya ruang bagi kawasan budidaya
3	Kawasan peruntukan pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kelautan (pesisir dan pulau-pulau kecil) baik budidaya (on-farm) maupun industri pengolahan hasil (off-farm)	Infrastruktur dan Sarana Prasarana, belum adanya industri pertanian/perikanan	Pengawasan dan pengendalian, Aktivitas yang merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi	Masih terbukanya ruang bagi kawasan budidaya

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan perikanan dan kelautan tidak akan terlepas dari asas pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga diperlukan kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 3.19
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan DPPK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pengelolaan Limbah	Pengawasan dan pengendalian, Aktivitas yang merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi	Tersedianya teknologi ramah lingkungan

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian dan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra Propinsi dan RTRW dan KLHS, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan
2. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian
4. Keterbatasan akses petani terhadap lembaga permodalan
5. Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian
6. Dampak Perubahan iklim (DPI)
7. Masih rendahnya daya saing kompetitif dan komparatif
8. Masih tingginya penggunaan pupuk dan pestisida an organik
9. Optimalisasi fungsi lahan pangonan sesuai UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. Pengembangan Kawasan Peternakan yang terintegrasi
11. Penyediaan bibit dan pengembangan sumberdaya genetik lokal
12. Perluasan areal HMT/HPT dan penyediaan pakan berkualitas
13. Peningkatan daya saing, nilai tambah dan kualitas produk peternakan;
14. Pengendalian Kesehatan Hewan
15. Kelembagaan petani usaha kehutanan dan perkebunan belum tertata dengan baik.
16. Kemandirian Perikanan Budidaya
17. Keberlanjutan, daya saing dan nilai tambah usaha dan produk perikanan budidaya.

- 
18. Kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya
 19. Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya di UPR dan UPTD.
 20. Keberlanjutan dan daya saing usaha perikanan tangkap
 21. Pemberdayaan Nelayan Kecil
 22. Peningkatan jumlah ukuran kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan.
 23. Pengelolaan tempat pelelangan ikan dan cara penanganan hasil tangkapan ikan yang baik;
 24. Revitalisasi lumbung pangan masyarakat, usaha pangan masyarakat dan lembaga distribusi pangan masyarakat;
 25. Peningkatan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah;
 26. Mewujudkan desa mandiri pangan;
 27. Peningkatan upaya penanganan rawan pangan;
 28. Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari;
 29. Peningkatan penganeekaragaman pangan,

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah difokuskan dalam menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya (pertanian, ketahanan pangan dan perikanan).

Misi RPJMD yang terkait dengan bidang tugas Perangkat Daerah adalah **Misi Ketiga yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;** bermakna *Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.*

Sementara sasaran Daerah yang terkait adalah **Sasaran : Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah.**

Ketahanan pangan masyarakat perlu diperkuat dan ditingkatkan, mengingat masalah pangan sangat rentan sekali terkena dampak dari perkembangan makro maupun global.

Perlu adanya dukungan seluruh sektor perekonomian masyarakat yaitu diantaranya sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan. Agar terwujud **misi ke 2 tersebut** maka para pelaku usaha pertanian yaitu petani, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan pemasar hasil perikanan serta nelayan perlu ditingkatkan kesejahteraannya.

Dalam mendukung program pembangunan daerah tersebut, maka diimplementasikan dalam **tujuan** yang ingin dicapai oleh **Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan** yaitu ” **Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah**”.

Indikator dari tujuan tersebut adalah **(1) Nilai Tukar Petani/Nelayan** dan **(2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**;

Tabel IV.1.

Target Skor Pola Pangan Harapan dan Persentase PDRB Tahun 2021-2026

No	Tahun	Skor PPH Konsumsi	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Nelayan
1	2021	75,82	93,18	111,47
2	2022	76,34	93,74	112,14
3	2023	76,87	94,40	112,92
4	2024	77,41	95,15	113,83
5	2025	77,97	96,01	114,85
6	2026	78,52	96,97	115,40

Pada tahun 2021 (akhir masa jabatan kepala daerah), Pola Pangan Harapan ditargetkan mencapai 75,82 yang merupakan indikator ketahanan pangan masyarakat, sedangkan Nilai Tukar Petani/Nelayan sebagai indikator kesejahteraan petani dan nelayan.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran-sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. **SASARAN 1 (S1)** : *Meningkatnya Penyuluhan Pertanian dengan indikator Cakupan bina kelompok tani (Jumlah kelompok tani terbina penyuluh/Total Kelompok tani x 100%).*

Tabel IV.2.
Target Persentase Meningkatnya Penyuluhan Pertanian
Tahun 2021-2026

No	Tahun	Prosentase Peningkatan
1	2021	53,22
2	2022	54,02
3	2023	54,88
4	2024	55,82
5	2025	56,82
6	2026	57,90

- b. **SASARAN 2 (S2)** : Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator *Prosentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*;

Tabel IV.3.
Target Persentase Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Prosentase Peningkatan
1	2021	1
2	2022	1,04
3	2023	1,05
4	2024	1,06
5	2025	1,07
6	2026	1,08

- c. **SASARAN 3 (S3)** : Meningkatnya produksi peternakan dengan indikator kinerja *Prosentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH*;

Tabel IV.4.

**Target Persentase Peningkatan Produksi Peternakan
Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Prosentase Peningkatan
1	2021	1
2	2022	1,1
3	2023	1,2
4	2024	1,3
5	2025	1,4
6	2026	1,5

- d. **SASARAN 4 (S4)** : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi. Sasaran ini memiliki indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1) Prosentase Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita adalah ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein. Pencapaian.

Tabel IV.5. Target Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Tahun	Ketersedian Energi/Prot Perkapita	
		Rataan Energi/ Protein	Trend (%)

1	2021	85,07	2
2	2022	86,86	2,1
3	2023	88,77	2,2
4	2024	90,81	2,3
5	2025	92,99	2,4
6	2026	95,31	2,5

2) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Pola konsumsi pangan masyarakat berbeda dan berubah dari waktu ke waktu, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pola konsumsi pangan antara daerah satu dengan daerah lainnya dapat berbeda tergantung dari lingkungannya termasuk sumberdaya dan budaya setempat, Dinamika Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia, selera dan pendapatan masyarakat. Demikian pula pola konsumsi pangan juga akan berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, perubahan kesadaran masyarakat akan pangan dan gizi serta perubahan gaya hidup. Dengan demikian, perubahan-perubahan tersebut, baik antar daerah maupun antar waktu akan menentukan perubahan berapa pangan yang harus disediakan dan bagaimana distribusinya agar harga pangan tersebut dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu entripoint dan sub system untuk memantapkan ketahanan pangan.

Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor .

Tabel IV.6. Konsumsi Pangan (Energi dan Protein) Perkapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No	Tahun	Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)
1	2021	2039,45	58,62
2	2022	2082,28	61,02
3	2023	2128,09	63,59
4	2024	2177,03	66,32
5	2025	2229,28	69,24
6	2026	2285,02	72,35

Target jangka menengah (2021-2026) untuk peningkatan konsumsi energi dan protein per kapita adalah 2,1% .

- e. **SASARAN 5 (S5)** : Meningkatnya produksi perikanan dengan indikator Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan. Produksi Perikanan merupakan rekapitulasi produksi ikan yang dihasilkan melalui proses budidaya dari berbagai jenis komoditas ikan air tawar maupun air payau serta produksi ikan yang dihasilkan dari penangkapan di perairan umum laut dan perairan umum daratan (waduk, danau, cekdam, sungai, embung). Target capaian indikator kinerja sasaran peningkatan produksi perikanan selengkapny adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8. Target Capaian Peningkatan Produksi Perikanan

No	Tahun	Produksi Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Tangkap	
		Produksi (ton)	Trend (%)	Produksi (ton)	Trend (%)
1	2021	76.271,72	1	1.712,28	1
2	2022	77.797,15	2	1.746,53	2
3	2023	80.131,06	3	1.798,92	3
4	2024	83.336,31	4	1.870,88	4
5	2025	87.503,12	5	1.964,43	5
6	2026	92.753,31	6	2.082,29	6
No	Tahun	Produksi Perikanan			
		Produksi (ton)		Trend (%)	
1	2021	77.984,00		1	
2	2022	79.543,68		2	
3	2023	81.929,99		3	
4	2024	85.207,19		4	
5	2025	89.467,55		5	
6	2026	94.835,60		6	

Tabel IV.9.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN KE					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	75,82	76,34	76,87	77,41	77,97	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi	Prosentase Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
									Prosentase Peningkatan Konsumsi Energi dan Protein Perkapita	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
		Nilai Tukar Petani	93,18	93,74	94,40	95,15	96,01	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Capaian Bina Kelompok Tani	%	53,22	54,02	54,88	55,82	56,82
		Nilai Tukar Nelayan	111,47	112,14	112,92	113,83	114,85	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Prosentase Peningkatan Rata-rata Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	1,00	1,04	1,05	1,06	1,07
								Meningkatnya Produksi Peternakan Yang ASUH	Prosentase Peningkatan Produksi Peternakan Yang ASUH	%	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
								Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung tujuan Perangkat Daerah dapat diuraikan secara spesifik mengenai strategi dan kebijakan yang hendak dicapai dari masing-masing Sasaran yaitu sebagai berikut :

1. **SASARAN 1 (S1)** : Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian dengan indikator *cakupan bina kelompok tani*.

Strategi yang diterapkan adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen kelompok tani dengan **arah kebijakan** Penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh pertanian.

2. **SASARAN 2 (S2)** : Meningkatnya rata-rata produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator *Prosentase peningkatan rata-rata produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*;

Strategi yang diterapkan adalah 1) Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan good agriculture practices (GAP) serta meningkatkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati; 2) Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya; 3) Mengoptimalkan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian; 4) Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian; dengan **arah kebijakan** 1) Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan; 2) Peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan melalui penerapan teknologi tepat guna dan diversifikasi usaha serta sinergitas

perencanaan perkebunan, didukung data dan informasi yang berkualitas; 3) Pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian; 4) Penerapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cetak Sawah Baru.

3. **SASARAN 3 (S3)** : Meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan yang ASUH dengan indikator *Prosentase peningkatan produksi peternakan yang ASUH*;

Strategi yang diterapkan adalah 1) Mengoptimalkan Pengembangan Peternakan Berbasis kawasan yang terintegrasi dengan arah kebijakan; 2) Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis; **dengan arah kebijakan** 1) Peningkatan Populasi Ternak Lokal dengan menstimulasi usaha budidaya ternak di masyarakat; 2) Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis;

4. **SASARAN 4 (S4)** : ” Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi” dengan indikator sasaran :

a. Prosentase Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

b. Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah “Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Pangan lokal”, dengan arah kebijakan “Mengembangkan dan merevitalisasi kelembagaan pangan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan menjadi sumber produksi pangan”.

5. **Sasaran 5 (S5)** : "Meningkatnya produksi perikanan" dengan indikator Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan.

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah "Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan ikan", dengan arah kebijakan "Mengembangkan dan merevitalisasi unit pembenihan serta mengoptimalkan pemberdayaan nelayan tangkap laut dan perairan umum".

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran tersebut adalah "Mengoptimalkan pembinaan dalam peningkatan disiplin aparatur" dengan arah kebijakan "Mengoptimalkan dukungan administrasi, manajemen dan sarana prasarana dalam tata kelola pemerintahan".

Strategi dan kebijakan dapat dijabarkan pada tabel V.1. berikut :

Tabel V.I
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah	1. Meningkatnya penyuluhan pertanian	1. Mengoptimalkan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian;	1. Pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian;
	2. Meningkatnya rata-rata Produksi Tanama Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan good agriculture practices (GAP) serta meningkatkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati;	2. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
		2. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya;	3. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui penerapan teknologi tepat guna dan diversifikasi usaha serta sinergitas perencanaan didukung data dan informasi yang berkualitas;
		3. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian;	4. Penerapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
	3. Meningkatnya Produksi Peternakan Yang ASUH	1. Mengoptimalkan Pengembangan Peternakan Berbasis kawasan yang terintegrasi dengan arah kebijakan;	1. Peningkatan populasi Ternak Lokal dengan mesntimulasi usaha budidaya ternak di masyarakat
		2. Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	2. Peningkatan Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menulat strategis dan zoonosis
	4. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan ikan.	1. Mengembangkan dan merevitalisasi unit pembenihan serta mengoptimalkan pemberdayaan nelayan tangkap laut dan perairan umum.
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Pangan lokal”, dengan arah kebijakan	1. Mengembangkan dan merevitalisasi kelembagaan pangan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan menjadi sumber produksi pangan.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program/kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya yang secara langsung maupun tidak langsung mengacu dan akan mendukung dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program prioritas terpilih untuk menunjang terwujudnya visi misi dimaksud.

Program Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Penerapan sub urusan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.



Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel VI. I

Matriks Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR TAHUN 2026		
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAANGAN SARANA PERTANIAN	Outcome : Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	100 %	100%	21.868.007.300	100%	157.100.526.650	100%	45.208.291.067	100%	47.468.705.620	100%	49.842.140.901	100%	52.334.247.946	500%	373.821.919.485	
	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kelompok tani yang terawasi	39 laporan	0	0	39 kec	4.945.526.650	39 kec	6.071.883.402	39 kec	6.375.477.572	39 kec	6.694.251.451	39 kec	7.028.964.023	39 kec	31.116.103.098
	Sub kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	39 laporan			39 laporan	4.945.526.650	39 laporan	5.993.133.402	39 laporan	6.292.790.072	39 laporan	6.607.429.576	39 laporan	6.937.801.054	39 laporan	30.776.680.754
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	N/A			39 laporan	-	39 laporan	78.750.000	39 laporan	82.687.500	39 laporan	86.821.875	39 laporan	91.162.969	39 laporan	339.422.344
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman							375.000.000		393.750.000		413.437.500		434.109.375		1.616.296.875

	Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 VUB	125.000.000	1 VUB	131.250.000	1 VUB	137.812.500	1 VUB	144.703.125	4 VUB	538.765.625
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	125.000.000	1 dok	131.250.000	1 dok	137.812.500	1 dok	144.703.125	4 dok	538.765.625
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	125.000.000	1 dok	131.250.000	1 dok	137.812.500	1 dok	144.703.125	4 dok	538.765.625
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman							100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		431.012.500
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250

	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						300.000.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500		1.293.037.500	
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	150.000.000	1 laporan	157.500.000	1 laporan	165.375.000	1 laporan	173.643.750	4 laporan	646.518.750
		Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	150.000.000	1 laporan	157.500.000	1 laporan	165.375.000	1 laporan	173.643.750	4 laporan	646.518.750
	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Outcome : Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	430.000.000	12 Bulan	562.500.000	12 Bulan	590.625.000	12 Bulan	620.156.250	12 Bulan	651.164.063	12 Bulan	3.104.445.313
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 ekor	50.000.000	35 ekor	52.500.000	40 ekor	55.125.000	45 ekor	57.881.250	150 ekor	215.506.250
		Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	4 dok	215.506.250
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 ekor	50.000.000	35 ekor	52.500.000	35 ekor	55.125.000	35 ekor	57.881.250	140 ekor	215.506.250

		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	12 Bulan	12 bulan	250.000.000	12 bulan	430.000.000	10 ton	262.500.000	10 ton	275.625.000	10 ton	289.406.250	10 ton	303.876.563	40 ton	1.811.407.813
			Meningkatkan pengawasan pakan ternak yang beredar	N/A			2%		3%		4%		5%		6%		6%	-
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 ton	100.000.000	6 ton	105.000.000	7 ton	110.250.000	8 ton	115.762.500	26 ton	431.012.500
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain		Tersedianya bibit dan hijau pakan		1 paket	21.618.073.300	151 paket	151.725.000.000	151 paket	37.798.907.665	151 paket	39.688.853.048	151 paket	41.673.295.701	151 paket	43.756.960.486	151 paket	336.261.024.200
		Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		1 paket	21.618.073.300	151 paket	151.725.000.000	200 ekor	37.698.907.665	250 ekor	39.583.853.048	300 ekor	41.563.045.701	350 ekor	43.641.197.986	1100 ekor	335.830.011.700
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 ton	100.000.000	6 ton	105.000.000	7 ton	110.250.000	8 ton	115.762.500	26 ton	431.012.500

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Outcome : Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)		100%	35.502.329.959	100%	105.201.600.000	100%	84.465.234.000	100%	100.415.643.019	100%	104.684.487.669	100%	109.613.683.453	500%	539.882.978.100
			Outcome : Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Bibit dan Galur Ternak)															
	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian		Outcome : Prosentase Produksi Pertanian		50 ha	11.798.800.000	200 Ha	20.620.000.000	205 Ha	12.388.740.000	210 Ha	13.735.324.319	215 ha	14.670.153.034	220 Ha	16.098.632.086	220 Ha	89.311.649.439
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang Dikelola		50 ha	4.117.800.000	200 Ha	20.620.000.000	1 dok	4.323.690.000	1 dok	5.135.824.319	1 dok	5.640.678.034	1 dok	6.617.683.336	5 dok	46.455.675.689
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	N/A	12 bulan	7.681.000.000	12 bulan		1 laporan	8.065.050.000	1 laporan	8.599.500.000	1 laporan	9.029.475.000	1 laporan	9.480.948.750	4 laporan	42.855.973.750

		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian terbangun		120 unit	23.584.803.209	97 unit	84.281.600.000	113 unit	71.361.494.000	129 unit	85.929.568.700	130	89.226.047.135	131 unit	92.687.349.492	131 unit	447.070.862.536
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang	N/A	119 unit	8.826.500.000	50 Unit	33.535.600.000	55 Unit	15.267.825.000	60 Unit	16.031.216.250	65 Unit	16.832.777.063	70 Unit	17.674.415.916	70 Unit	108.168.334.228
		Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	N/A	N/A	4 unit		5 unit	8.000.000.000	6 unit	8.000.000.000	7 unit	8.000.000.000	8 unit	8.000.000.000	8 unit	32.000.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	21 unit	20 unit	10.147.780.000	20 unit	28.426.000.000	20 unit	10.655.169.000	20 unit	11.187.927.450	20 unit	11.747.323.823	20 unit	12.334.690.014	100 unit	84.498.890.286
		Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Dam Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	N/A	N/A	8 unit	4.000.000.000	8 unit	12.000.000.000	8 unit	12.000.000.000	8 unit	12.000.000.000	8 unit	12.000.000.000	8 unit	52.000.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	1.000.000.000	5 unit	13.050.000.000	5 unit	13.702.500.000	5 unit	14.387.625.000	20 unit	42.140.125.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.050.000.000	5 unit	1.102.500.000	5 unit	1.157.625.000	20 unit	4.310.125.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	500 ha	4.599.603.209	500 Ha	17.220.000.000	500 Ha	18.081.000.000	500 Ha	18.985.050.000	500 Ha	19.934.302.500	500 Ha	20.931.017.625	500 Ha	99.750.973.334

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.050.000.000	5 unit	1.102.500.000	5 unit	1.157.625.000	20 unit	4.310.125.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Porong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	1 unit	10.920.000	1 unit	5.100.000.000	1 unit	315.000.000	1 unit	330.750.000	1 unit	347.287.500	1 unit	364.651.875	1 unit	6.468.609.375
			Terbangunnya RPH-U di Kab. Tasikmalaya	N/A	N/A	N/A	1 unit		1 unit	3.150.000.000	1 unit	3.307.500.000	1 unit	3.472.875.000	1 unit	3.646.518.750	1 unit	13.576.893.750
			Terbangunnya TPH Kurban di Kab. Tasikmalaya	N/A	N/A	N/A	1 unit		1 unit	367.500.000	1 unit	385.875.000	1 unit	405.168.750	1 unit	425.427.188	1 unit	1.583.970.938
			Terbangunnya puskesmas di Manonjaya	N/A	N/A	N/A	1 unit		1 unit	525.000.000	1 unit	551.250.000	1 unit	578.812.500	1 unit	607.753.125	1 unit	2.262.815.625
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sumbe bibit dan rumpun galur	N/A	1 paket	118.726.750	2 Paket	300.000.000	2 Paket	415.000.000	2 Paket	435.750.000	2 Paket	457.537.500	2 Paket	480.414.375	2 Paket	2.207.428.625
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	N/A	1 laporan	118.726.750	1 laporan	300.000.000	1 laporan	315.000.000	1 laporan	330.750.000	1 laporan	347.287.500	1 laporan	364.651.875	6 laporan	1.776.416.125

		Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.250.000	1 laporan	115.762.500	4 laporan	431.012.500
	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum		Meningkatnya Lahan Pengembalaan Umum							300.000.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500		1.293.037.500
		Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Ha	100.000.000	1 Ha	105.000.000	1 Ha	110.250.000	1 Ha	115.762.500	4 Ha	431.012.500
		Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Ha	100.000.000	1 Ha	105.000.000	1 Ha	110.250.000	1 Ha	115.762.500	4 Ha	431.012.500
		Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.250.000	1 laporan	115.762.500	4 laporan	431.012.500
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			Outcome : Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Keswan dan Veteriner)	100 %	100%	43.806.300	100%	1.030.000.000	100%	1.676.500.000	100%	1.760.325.000	100%	1.848.341.250	100%	1.940.758.313	500%	8.299.730.863
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten		Terjanimnya kesehatan hewan	2 paket	2 paket	-	2 paket	660.000.000	2 paket	843.000.000	2 paket	885.150.000	2 paket	929.407.500	2 paket	975.877.875	2 paket	4.293.435.375

	n/Kota																	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 paket	0	-	1 laporan	660.000.000	1 laporan	693.000.000	1 laporan	727.650.000	1 laporan	764.032.500	1 laporan	802.234.125	5 laporan	3.646.916.625
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	75.000.000	1 laporan	78.750.000	1 laporan	82.687.500	1 laporan	86.821.875	4 laporan	323.259.375
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	75.000.000	1 laporan	78.750.000	1 laporan	82.687.500	1 laporan	86.821.875	4 laporan	323.259.375
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota							150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750		646.518.750
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250

		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Jasa Laboratorium kesehatan hewan	4 unit	4 unit	33.306.300	4 unit	270.000.000	4 unit	383.500.000	4 unit	402.675.000	4 unit	422.808.750	3	443.949.188	3	1.956.239.238
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.250.000	1 laporan	115.762.500	4 laporan	431.012.500
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 laporan	3 laporan	33.306.300	3 laporan	270.000.000	3 laporan	283.500.000	3 laporan	297.675.000	3 laporan	312.558.750	3 laporan	328.186.688	27 laporan	1.525.226.738
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Terlaksananya pengawasan masyarakat veteriner	3 unit	3 unit	10.500.000	3 unit	100.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	210.000.000	3 unit	220.500.000	3 unit	231.525.000	3 unit	972.525.000

		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 laporan	3 laporan	10.500.000	3 laporan	100.000.000	3 laporan	105.000.000	3 laporan	110.250.000	3 laporan	115.762.500	3 laporan	121.550.625	18 laporan	563.063.125
		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	20.000.000	1 laporan	21.000.000	1 laporan	22.050.000	1 laporan	23.152.500	4 laporan	86.202.500
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	26.250.000	1 dokumen	27.562.500	1 dokumen	28.940.625	4 dokumen	107.753.125
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan									100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		431.012.500
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
		Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kasus	50.000.000	1 kasus	52.500.000	1 kasus	55.125.000	1 kasus	57.881.250	4 kasus	215.506.250
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Terkendalinya Bencana Pertanian	100%	0	-	100%	400.000.000	100%	820.000.000	100%	861.000.000	100%	904.050.000	100%	949.252.500	500%	3.934.302.500
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Tertanggulangnya bencana pertanian	1 paket	0	-	2 paket	400.000.000	2 paket	820.000.000	2 paket	861.000.000	2 paket	904.050.000	2 paket	949.252.500	2 paket	3.934.302.500

Kabupaten/Kota																		
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	47.336 ha	0	-	47.336 ha	400.000.000	47.336 ha	420.000.000	47.336 ha	441.000.000	47.336 ha	463.050.000	47.336 ha	486.202.500	47.336 ha	2.210.252.500
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 ha	100.000.000	5 ha	105.000.000	5 ha	110.250.000	5 ha	115.762.500	20 ha	431.012.500
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 ha	100.000.000	1 ha	105.000.000	1 ha	110.250.000	1 ha	115.762.500	4 ha	431.012.500
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.250.000	1 laporan	115.762.500	4 laporan	431.012.500
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.250.000	1 laporan	115.762.500	4 laporan	431.012.500

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Outcome : prosentase izin usaha pertanian				100%	499.999.800	100%	1.099.999.790	100%	1.154.999.780	100%	1.212.749.768	100%	1.273.387.257	500%	5.241.136.395
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Outcome : prosentase izin usaha pertanian	N/A	-	-	34 PBS	499.999.800	34 PBS	724.999.790	-	761.249.780	34 PBS	799.312.268	34 PBS	839.277.882	34 PBS	3.624.839.520
		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	220.500.000	1 dokumen	231.525.000	4 dokumen	243.101.250
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	249.999.800	1 dokumen	262.499.790	1 dokumen	275.624.780	1 dokumen	289.406.018	1 dokumen	303.876.319	5 dokumen	1.381.406.707
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan Terawasinya Penerapan Izin Usaha Pertanian	N/A	N/A	N/A	1 laporan	250.000.000	1 laporan	262.500.000	1 laporan	275.625.000	1 laporan	289.406.250	1 laporan	303.876.563	5 laporan	1.381.407.813
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah		Tersedianya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							250.000.000		262.500.000		275.625.000		289.406.250		1.077.531.250

	Potong Hewan																	
		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.500.000	1 dokumen	55.125.000	1 dokumen	57.881.250	4 dokumen	215.506.250
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Tersedianya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,							125.000.000		131.250.000		137.812.500		144.703.125		538.765.625

			Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan															
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	75.000.000	1 laporan	78.750.000	1 laporan	82.687.500	1 laporan	86.821.875	4 laporan	323.259.375
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Cakupan Bina Kelompok Tani		125 kelompok	1.347.898.896	237 kelompok	16.065.766.850	240 kelompok	9.498.297.046	245 kelompok	9.973.211.898	250 kelompok	10.471.872.493	255 kelompok	11.255.931.743	255 kelompok	58.612.978.926
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Terlaksananya penyuluhan pertanian		125	1.347.898.896	237	16.065.766.850	39 kec	9.498.297.046	39 kec	9.973.211.898	39 kec	10.471.872.493	39 kec	11.255.931.743	39 kec	58.612.978.926
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		39 unit	1.347.898.896	39 unit	8.558.144.750	39 unit	1.415.293.841	39 unit	1.486.058.533	39 unit	1.560.361.459	39 unit	1.898.845.158	39 unit	16.266.602.637
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	39 unit	-	39 unit	5.630.000.000	39 unit	5.911.500.000	39 unit	6.207.075.000	39 unit	6.517.428.750	39 unit	6.843.300.188	39 unit	31.109.303.938
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		39 unit	-	39 unit	1.877.622.100	39 unit	1.971.503.205	39 unit	2.070.078.365	39 unit	2.173.582.284	39 unit	2.282.261.398	39 unit	10.375.047.351
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	200.000.000	1 unit	210.000.000	1 unit	220.500.000	1 unit	231.525.000	4 unit	862.025.000

			Dibentuk															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			Outcome : Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	100%	100%	500.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.187.500.000	100%	1.159.375.000	100%	1.164.218.750	100%	1.171.023.438	500%	6.432.117.188
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya lumbung pangan	1 unit	1 unit	500.000.000	1	1.250.000.000	1 unit	1.187.500.000	1 unit	1.159.375.000	1 unit	1.164.218.750	1 unit	1.171.023.438	1 unit	6.432.117.188
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 unit	1 unit	500.000.000	1 unit	1.250.000.000	1 unit	562.500.000	1 unit	528.125.000	1 unit	526.406.250	1 unit	526.320.313	1 unit	3.893.351.563
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia															
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	N/A	N/A	N/A	1 unit	-	N/A	500.000.000	1 unit	2.000.000.000						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	75.000.000	1 laporan	78.750.000	1 laporan	82.687.500	1 laporan	86.821.875	4 laporan	323.259.375

		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.500.000	1 dokumen	55.125.000	1 dokumen	57.881.250	4 dokumen	215.506.250
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Outcome : Prosentase ketahanan pangan masyarakat	N/A	100%	1.301.755.000	100%	7.648.100.000	100%	3.798.092.750	100%	3.987.997.388	100%	4.187.397.257	100%	4.396.767.120	500%	25.320.109.514
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Terpantainya stok pasokan pangan	N/A	12 kecamatan	-	12 kecamatan	1.005.600.000	12 kecamatan	1.631.250.000	12 kecamatan	1.712.812.500	12 kecamatan	1.798.453.125	12 kecamatan	1.888.375.781	12 kecamatan	8.036.491.406
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	50.000.000	1 laporan	52.500.000	1 laporan	55.125.000	1 laporan	57.881.250	4 laporan	215.506.250
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	N/A	12	-	12 Kecamatan	330.000.000	1 laporan	346.500.000	1 laporan	363.825.000	1 laporan	382.016.250	1 laporan	401.117.063	4 laporan	1.823.458.313

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	200.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	220.500.000	1 laporan	231.525.000	4 laporan	862.025.000
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	N/A	N/A	N/A	12 bln	55.600.000	1 dokumen	183.750.000	1 dokumen	192.937.500	1 dokumen	202.584.375	1 dokumen	212.713.594	4 dokumen	847.585.469
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	N/A	N/A	N/A	3 Unit	620.000.000	3 Unit	651.000.000	3 Unit	683.550.000	3 Unit	717.727.500	3 Unit	753.613.875	3 Unit	3.425.891.375
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	100.000.000	1 unit	105.000.000	1 unit	110.250.000	1 unit	115.762.500	4 unit	431.012.500
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 keluarga	100.000.000	10 keluarga	105.000.000	10 keluarga	110.250.000	10 keluarga	115.762.500	40 keluarga	431.012.500
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Tersedianya cadangan pangan	50 Ton	50 Ton	650.000.000	60 Ton	700.000.000	70 Ton	1.232.500.000	80 Ton	1.294.125.000	90 Ton	1.358.831.250	100 Ton	1.426.772.813	100 Ton	6.662.229.063
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	200.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	220.500.000	1 laporan	231.525.000	4 laporan	862.025.000
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.500.000	1 dokumen	55.125.000	1 dokumen	57.881.250	4 dokumen	215.506.250

		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 ton	50 Ton	650.000.000	60 Ton	700.000.000	70 Ton	682.500.000	80 Ton	716.625.000	90 Ton	752.456.250	100 Ton	790.079.063	100 Ton	4.291.660.313
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70 ton	300.000.000	80 Ton	315.000.000	90 Ton	330.750.000	100 Ton	347.287.500	100 Ton	1.293.037.500
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal							100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		431.012.500
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.250.000	1 laporan	115.762.500	4 laporan	431.012.500
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Tercapainya target konsumsi pangan	4563 RTM	50	651.755.000	7 Paket	5.942.500.000	7 Paket	834.342.750	7 Paket	876.059.888	7 Paket	919.862.882	7 Paket	965.856.026	7 Paket	10.190.376.545
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	4 dok	215.506.250

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4563 RTM	50	651.755.000	1 laporan	5.942.500.000	1 laporan	684.342.750	1 laporan	718.559.888	1 laporan	754.487.882	1 laporan	792.212.276	6 laporan	9.543.857.795
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.250.000	1 laporan	115.762.500	4 laporan	431.012.500
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										500.000.000		525.000.000		551.250.000		578.812.500		2.155.062.500
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan							100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		431.012.500
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	100.000.000	1 dok	105.000.000	1 dok	110.250.000	1 dok	115.762.500	4 dok	431.012.500
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota							400.000.000		420.000.000		441.000.000		463.050.000		1.724.050.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 laporan	100.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	110.250.000	1 laporan	115.762.500	4 laporan	431.012.500

		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	300.000.000	1 dok	315.000.000	1 dok	330.750.000	1 dok	347.287.500	4 dok	1.293.037.500
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Outcome : Prosentase keamanan pangan masyarakat	N/A	100%	-	100%	400.000.000	100%	570.000.000	100%	598.500.000	100%	628.425.000	100%	659.846.250	500%	2.856.771.250
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	N/A	6 Kecamatan	-	6 Kecamatan	400.000.000	7 Kecamatan	570.000.000	8 Kecamatan	598.500.000	9 Kecamatan	628.425.000	10 Kecamatan	659.846.250	10 Kecamatan	2.856.771.250
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	N/A	6 dok	-	6 dok	250.000.000	7 dok	262.500.000	8 dok	275.625.000	9 dok	289.406.250	10 dok	303.876.563	10 dok	1.381.407.813
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 sertifikat	50.000.000	2 sertifikat	52.500.000	2 sertifikat	55.125.000	2 sertifikat	57.881.250	8 sertifikat	215.506.250
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	4 dok	215.506.250

		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	4 dok	215.506.250
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	6 dok	150.000.000	7 dok	157.500.000	8 dok	165.375.000	9 dok	173.643.750	10 dok	182.325.938	10 dok	828.844.688
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Outcome : Produksi perikanan tangkap	N/A	1712,28	2.150.427.500	1746,53	4.545.204.400	1798,92	111.033.479.305	1870,88	116.585.153.270	1964,43	122.414.410.934	2082,29	128.535.131.480	2082,29	485.263.806.889
			Outcome : Cakupan bina kelompok nelayan															-
			Outcome : Prosentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT															-
	Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ikan tangkap	N/A	1712,28	1.900.427.500	1746,53	4.392.747.500	1798,92	104.763.083.750	1870,88	110.001.237.938	1964,43	115.501.299.834	2082,29	121.276.364.826	2082,29	457.835.161.348
		Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di	N/A	N/A	N/A	1 dok	49.997.500	1 dok	52.497.375	1 dok	55.122.244	1 dok	57.878.356	1 dok	60.772.274	5 dok	276.267.748

		Ikan	Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia															
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	N/A	1 unit	1.900.427.500	1 unit	35.000.000	1 unit	100.187.448.875	1 unit	105.196.821.319	1 unit	110.456.662.385	12 bulan	115.979.495.504	6 unit	433.755.855.582
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Penangkapan Ikan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	N/A	N/A	N/A	1 unit	4.307.750.000	1 unit	4.523.137.500	1 unit	4.749.294.375	1 unit	4.986.759.094	1 unit	5.236.097.048	5 unit	23.803.038.017
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Operasional TPI	N/A	12 bulan	-	12 bulan	76.499.100	12 bulan	2.166.223.055	12 bulan	2.274.534.208	12 bulan	2.388.260.918	12 bulan	2.507.673.964	12 bulan	9.413.191.245
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	N/A	1	-	1 dok	1.500.000	1 dok	2.087.474.000	1 dok	2.191.847.700	1 dok	2.301.440.085	1 dok	2.416.512.089	5 dok	8.998.773.874
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 bulan	1		12 Bulan	74.999.100	12 Bulan	78.749.055	12 Bulan	82.686.508	12 Bulan	86.820.833	12 Bulan	91.161.875	12 Bulan	414.417.371
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Tersedianya Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							300.000.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500		1.293.037.500

	yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	150.000.000	1 dok	157.500.000	1 dok	165.375.000	1 dok	173.643.750	4 dok	646.518.750
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 rekomendasi	150.000.000	1 rekomendasi	157.500.000	1 rekomendasi	165.375.000	1 rekomendasi	173.643.750	4 rekomendasi	646.518.750
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)		Tersedianya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							300.000.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500		1.293.037.500

	Daerah Kabupaten/ Kota																	
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	150.000.000	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	4 unit	646.518.750
		Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	150.000.000	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	4 unit	646.518.750
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah		Tersedianya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							300.000.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500		1.293.037.500

Kabupaten/Kota																		
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	150.000.000	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	4 unit	646.518.750	
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	150.000.000	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	4 unit	646.518.750	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah nelayan kecil	N/A		250.000.000		75.957.800		3.204.172.500		3.364.381.125		3.532.600.181		3.709.230.190		14.136.341.797	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	N/A	N/A	N/A	3000 orang	44.450.000	3000 orang	446.672.500	3000 orang	469.006.125	3000 orang	492.456.431	3000 orang	517.079.253	3000 orang	1.969.664.309	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	N/A	1 kelompok	250.000.000	1 kelompok	31.507.800	2 kelompok	2.657.500.000	2 kelompok	2.790.375.000	2 kelompok	2.929.893.750	2 kelompok	3.076.388.438	8 kelompok	11.735.664.988	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit usaha	100.000.000	2 unit usaha	105.000.000	2 unit usaha	110.250.000	2 unit usaha	115.762.500	8 unit usaha	431.012.500	

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Outcome : Prosentase legalitas usaha perikanan budidaya	N/A	100%	1.742.517.500	100%	2.124.253.436	100%	5.745.900.808	100%	6.033.195.848	100%	6.334.855.640	100%	6.651.598.422	500%	28.632.321.654
			Outcome : Prosentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil		1 paket		8 paket	8 paket		-								
			Outcome : Prosentase tanda daftar pembudi daya ikan kecil															-
			Outcome : Produksi perikanan budi daya															-
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya data pengolahan ikan							200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		862.025.000

		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	100.000.000	1 dok	105.000.000	1 dok	110.250.000	1 dok	115.762.500	4 dok	431.012.500
--	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	--------------------

		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	100.000.000	1 dok	105.000.000	1 dok	110.250.000	1 dok	115.762.500	4 dok	431.012.500
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Fasilitas pembudidaya ikan	N/A	12	-	2 paket	366.235.650	2 paket	384.547.433	2 paket	403.774.804	2 paket	423.963.544	2 paket	445.161.722	2 paket	2.023.683.153
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	12 bulan	12	-	1 Paket	66.514.300	1 Paket	69.840.015	1 Paket	73.332.016	1 Paket	76.998.617	1 Paket	80.848.547	1 Paket	367.533.495

		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	N/A	N/A	N/A	1 Paket	299.721.350	1 Paket	314.707.418	1 Paket	330.442.788	1 Paket	346.964.928	1 Paket	364.313.174	1 Paket	1.656.149.658
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Tersedianya pengelola pembudidayaan ikan	N/A	12 bulan	1.742.517.500		1.758.017.786	12 bulan	5.161.353.375	12 bulan	5.419.421.044	12 bulan	5.690.392.096	12 bulan	5.974.911.701	12 bulan	25.746.613.501
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	1 dok	7.030.000	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	5 dok	222.536.250
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 unit	1.722.717.500	6 unit	314.774.000	6 unit	1.808.853.375	6 unit	1.899.296.044	6 unit	1.994.260.846	6 unit	2.093.973.888	6 unit	9.833.875.653
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 unit	19.800.000	1 unit	1.432.775.500	1 unit	3.000.000.000	1 unit	3.150.000.000	1 unit	3.307.500.000	1 unit	3.472.875.000	1 unit	14.382.950.500
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	N/A	0	-	1 dok	3.438.286	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	1 dok	60.775.313	4 dok	229.719.849

		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 ha	150.000.000	1 ha	157.500.000	1 ha	165.375.000	1 ha	173.643.750	4 ha	646.518.750
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 orang	100.000.000	10 orang	105.000.000	10 orang	110.250.000	10 orang	115.762.500	40 orang	431.012.500
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		431.012.500
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten		Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap							100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		431.012.500

	n/Kota																	
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	4 dok	215.506.250
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	4 dok	215.506.250
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Outcome : Prosentase tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	N/A	5%	395.000.000	6%	555.028.400	7%	2.047.529.820	8%	2.149.906.311	9%	2.257.401.627	10%	2.370.271.708	10%	9.775.137.865
			Outcome : Produksi pengolahan hasil usaha perikanan															-
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		Tersedianya data pengolahan ikan	N/A	N/A	N/A	12 bulan	7.030.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	52.500.000	12 bulan	55.125.000	12 bulan	57.881.250	12 bulan	222.536.250

	Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil																	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	N/A	N/A	N/A	1 dok	7.030.000	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	4 dok	222.536.250
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Tersalurkannya bantuan sarana usaha pengolahan ikan	N/A	0	-	10 kel	59.506.500	10 kel	62.481.825	10 kel	65.605.916	10 kel	68.886.212	10 kel	72.330.523	10 kel	328.810.976
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 kel	0	-	10 Kel	59.506.500	10 Kel	62.481.825	10 Kel	65.605.916	10 Kel	68.886.212	10 Kel	72.330.523	10 Kel	328.810.976
			Terlaksananya rehabilitasi bangunan unit pengolahan ikan kering															-

			Terselurkannya bantuan peralatan pasca panen ikan/udang																-
			Terselurkannya bantuan peralatan pengolahan ikankering																-
			Terselurkannya bantuan peralatan pengolahan kerupuk ikan																-
			Terselurkannya bantuan kemasan produk olahan																-
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya Bahan Baku Pengolah Ikan	N/A	17 paket	395.000.000	12 paket	495.521.900	12 paket	1.935.047.995	12 paket	2.031.800.395	12 paket	2.133.390.414	12 paket	2.240.059.935	12 paket	9.230.820.639	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	1 ton	495.521.900	1 ton	520.297.995	1 ton	546.312.895	1 ton	573.628.539	1 ton	602.309.966	5 ton	2.738.071.296	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	N/A	17	395.000.000	7 pelaku usaha	-	7 pelaku usaha	1.414.750.000	7 pelaku usaha	1.485.487.500	7 pelaku usaha	1.559.761.875	7 pelaku usaha	1.637.749.969	7 pelaku usaha	6.492.749.344	

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP	60,57	63,60	22.443.974.907	67,10	24.060.185.146	67,16	31.981.490.718	70,85	34.140.389.254	70,99	36.407.232.717	74,96	38.787.418.353	74,96	187.820.691.095
			Nilai IKM	78,98	82,93	1.761.951.150	83,32	3.629.254.970	83,72	2.742.054.104	84,11	2.879.156.809	84,51	3.023.114.649	84,90	3.174.270.382	84,90	17.209.802.063
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	92.524.000	100%	144.999.700	100%	450.000.000	100%	472.500.000	100%	496.125.000	100%	520.931.250	100%	2.177.079.950
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	4 dok	72.524.000	4 dok	75.000.000	4 dok	100.000.000	4 dok	105.000.000	4 dok	110.250.000	4 dok	115.762.500	4 dok	578.536.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	0	0	19 dok	39.999.700	19 dok	250.000.000	19 dok	262.500.000	19 dok	275.625.000	19 dok	289.406.250	19 dok	1.117.530.950
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	22 dok	20.000.000	22 dok	30.000.000	22 dok	100.000.000	22 dok	105.000.000	22 dok	110.250.000	22 dok	115.762.500	22 dok	481.012.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	1 tahun	1 tahun	22.351.450.907	1 tahun	23.915.185.446	1 tahun	31.531.490.718	1 tahun	33.667.889.254	1 tahun	35.911.107.717	1 tahun	38.266.487.103	1 tahun	185.643.611.145
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	22.351.450.907	1 Tahun	23.915.185.446	1 Tahun	31.531.490.718	1 Tahun	33.667.889.254	1 Tahun	35.911.107.717	1 Tahun	38.266.487.103	1 Tahun	185.643.611.145

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Peserta Bimtek	1 paket	0	-	1 Paket	195.300.000	1 Paket	230.065.000	1 Paket	241.568.250	1 Paket	253.646.663	1 Paket	266.328.996	1 Paket	1.186.908.908
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	25.000.000	1 dok	26.250.000	1 dok	27.562.500	1 dok	28.940.625	1 dok	107.753.125
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	0	-	1 Paket	195.300.000	1 Paket	205.065.000	1 Paket	215.318.250	1 Paket	226.084.163	1 Paket	237.388.371	1 Paket	1.079.155.783
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terfasilitasi ya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	345.686.750	12 bulan	904.015.670	12 bulan	916.928.954	12 bulan	962.775.401	12 bulan	1.010.914.171	12 bulan	1.061.459.880	12 bulan	5.201.780.826
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	8.042.700	1 Paket	178.242.020	1 Paket	187.154.121	1 Paket	196.511.827	1 Paket	206.337.418	1 Paket	216.654.289	1 Paket	992.942.376
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	74.919.600	1 Paket	88.072.450	1 Paket	92.476.073	1 Paket	97.099.876	1 Paket	101.954.870	1 Paket	107.052.613	1 Paket	561.575.482
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	32.520.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	31.500.000	1 Tahun	33.075.000	1 Tahun	34.728.750	1 Tahun	36.465.188	1 Tahun	198.288.938
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	102.095.350	1 Paket	198.243.200	1 Paket	208.155.360	1 Paket	218.563.128	1 Paket	229.491.284	1 Paket	240.965.849	1 Paket	1.197.514.171
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 Bulan	90.750.000	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	66.150.000	12 Bulan	69.457.500	12 Bulan	72.930.375	12 Bulan	422.287.875

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	68.109.100	12 Bulan	165.328.000	12 Bulan	173.594.400	12 Bulan	182.274.120	12 Bulan	191.387.826	12 Bulan	200.957.217	12 Bulan	981.650.663
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	1 Tahun	87.480.000	1 Tahun	91.854.000	1 Tahun	96.446.700	1 Tahun	101.269.035	1 Tahun	106.332.487	1 Tahun	483.382.222
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	1 Tahun	65.900.000	1 Tahun	69.195.000	1 Tahun	72.654.750	1 Tahun	76.287.488	1 Tahun	80.101.862	1 Tahun	364.139.099
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	12 bulan	1.082.826.400	12 bulan	1.252.215.000	12 bulan	1.215.844.250	12 bulan	1.276.636.463	12 bulan	1.340.468.286	12 bulan	1.407.491.700	12 bulan	7.575.482.098
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	253.185.000	12 Bulan	308.958.000	12 Bulan	265.844.250	12 Bulan	279.136.463	12 Bulan	293.093.286	12 Bulan	307.747.950	12 Bulan	1.707.964.948
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1	829.641.400	12 Bulan	943.257.000	12 Bulan	950.000.000	12 Bulan	997.500.000	12 Bulan	1.047.375.000	12 Bulan	1.099.743.750	12 Bulan	5.867.517.150
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	333.438.000	1 tahun	1.277.724.300	1 tahun	379.215.900	1 tahun	398.176.695	1 tahun	418.085.530	1 tahun	438.989.806	1 tahun	3.245.630.231

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1 Tahun	242.113.500	1 Tahun	300.438.300	1 Tahun	254.219.175	1 Tahun	266.930.134	1 Tahun	280.276.640	1 Tahun	294.290.472	1 Tahun	1.638.268.222
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	0	-	1 Tahun	27.720.000	1 Tahun	29.106.000	1 Tahun	30.561.300	1 Tahun	32.089.365	1 Tahun	33.693.833	1 Tahun	153.170.498
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	91.324.500	1 Tahun	949.566.000	1 Tahun	95.890.725	1 Tahun	100.685.261	1 Tahun	105.719.524	1 Tahun	111.005.501	1 Tahun	1.454.191.511

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan penyelenggaraan bidang urusan urusan PERTANIAN, urusan KETAHANAN PANGAN, urusan KELAUTAN dan PERIKANAN pada masa tahun rencana 2021-2026 disusun sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah sebagai berikut :

Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan

Bidang Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan

1. Nilai Tukar Tani/Nelayan (NTP/NTN)

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu pada RPJMD selengkap pada tabel berikut :

Tabel VII.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten
Tasikmalaya 2021 - 2026

Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Urusan Perikanan

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Urusan Ketahanan Pangan										
1.	Skor Pola Pangan Harapan	poin	75,82	76,34	76,87	77,41	77,97	78,52	78,52	
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek Ketersediaan dan Konsumsi	%	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	
3.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	ton	50	50	60	70	80	90	100	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (indikator SDG's)
Urusan Pertanian										

1.	Nilai Tukar Petani	Indeks	93,18	93,74	94,4	95,15	96,01	96,97	96,97	
	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	111,47	112,14	112,92	113,83	114,85	115,4	115,4	
2.	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	%	53,22	53,22	54,02	54,88	55,82	56,82	56,82	
3.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	%	1	1	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07	
4.	Meningkatnya Produksi Peternakan Yang ASUH	%	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	
5.	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Ha	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	PERDA NO 4 TH 2016 (Indikator SDG's)
6.	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	ekor	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	Indikator SDG's
7.	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	ekor	4.578	4.499	4.399	4.299	4199	4099	4000	Indikator SDG's
Urusan Perikanan										
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	%	1	1	2	3	4	5	6	
2.	Jumlah nelayan yang terlindungi	Orang	6.863	9.000	9.050	9.060	9.060	9.070	9.070	Indikator SDG's

BAB VIII PENUTUP

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, maka dalam rangka pencapaian program pembangunan ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya disusunlah Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya 2021–2026 sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan pengembangan ketahanan pangan dan perikanan jangka waktu menengah (lima tahunan). Sebagai proses yang terus menerus maka Renstra senantiasa membuka diri untuk dilakukan evaluasi baik dari sisi formulasi/substansi, implementasi dan dampaknya. Rencana Strategis ini diharapkan memberikan arah dan langkah kebijakan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya sehingga lebih mempermudah dan lebih jelas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas setiap tahun.

KEPALA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



NURAEDIDIN, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198403 1 001

